

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

RENCANA AKSI NASIONAL VI OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Semester III Tahun 2021 - 2022

SEKRETARIAT NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA



Disusun oleh:

Tim Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

2022

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
Gambaran Umum Monitoring dan Evaluasi RAN OGI 2020-2022 Semester I – Semester III	4
CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI 2020-2022: SEMESTER I – SEMESTER III	9
I. Catatan Umum dan Tindak Lanjut Penetapan Target Capaian	9
II. Catatan Umum dan Tindak Lanjut Implementasi Target	10
TUJUAN, TEMA, DAN KOMITMEN RAN OGI 2020-2022.....	11
STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	16
I. Mekanisme Pelaksanaan RAN OGI.....	16
II. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAN OGI	16
1) Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	16
2) Evaluasi	17
III. Mekanisme Pelengkapan Laporan Capaian Target.....	19
DESKRIPSI CAPAIAN PELAKSAAN RAN OGI 2020-2022: SEMESTER I – SEMESTER III TAHUN 2021.....	19
I. Berdasarkan Capaian Administratif Kementerian /Lembaga.....	19
II. Berdasarkan Capaian Administratif Organisasi Masyarakat Sipil.....	20
DESKRIPSI CAPAIAN 18 KOMITMEN RAN OGI 2020-2022 SEMESTER I – SEMESTER III ..	21
Komitmen 1	21
Komitmen 2	30
Komitmen 3	38
Komitmen 4	43
Komitmen 5	51
Komitmen 6	57
Komitmen 7	67
Komitmen 8	73
Komitmen 9	83
Komitmen 10.....	91
Komitmen 11	98
Komitmen 12.....	105

Komitmen 13.....	112
Komitmen 14.....	119
Komitmen 15.....	125
Komitmen 16.....	131
Komitmen 17.....	135
Komitmen 18.....	142

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inisiatif mendorong keterbukaan pemerintah di Indonesia telah ditandai oleh berbagai bentuk, mulai dari lahir Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018), hingga partisipasi Indonesia dalam *Open Government Partnership* yang telah diinstitutionalkan dalam Keputusan Presiden nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Open Government Partnership*, hingga berdiri Sekretariat *Open Government Indonesia* (OGI) yang ditujukan untuk melaksanakan sejumlah Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI). Serangkaian inisiatif tersebut tidak lain untuk mendorong hadirnya pemerintahan yang terbuka dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2022, Sekretariat OGI telah mengeluarkan enam RAN OGI, dengan RAN terbaru yang sedang dikerjakan adalah RAN OGI VI periode 2020-2022. Rencana aksi ini akan berakhir pada akhir tahun 2022. Setiap semesternya, Sekretariat Open Government Indonesia melaksanakan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan implementasi dari RAN dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dokumen Monitoring dan Evaluasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh capaian implementasi dari RAN OGI VI yang dikerjakan oleh masing-masing *stakeholder*.

Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, Sekretariat Open Government Indonesia akan mendalami capaian dari 21 Kementerian/Lembaga dan 24 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bertanggung jawab melaksanakan 18 Komitmen dengan 55 Target Capaian. Monitoring dan Evaluasi kepada seluruh *stakeholder* dilakukan atas dua hal penting, yaitu terkait dengan target capaian dan proses koreksi antar *stakeholder*, yang merupakan salah satu keunikan dari pelaksanaan RAN OGI. Dokumen ini dapat menjadi bahan bagi seluruh *stakeholder* untuk dapat mendorong pelaksanaan keterbukaan pemerintahan yang lebih baik lagi kedepannya.

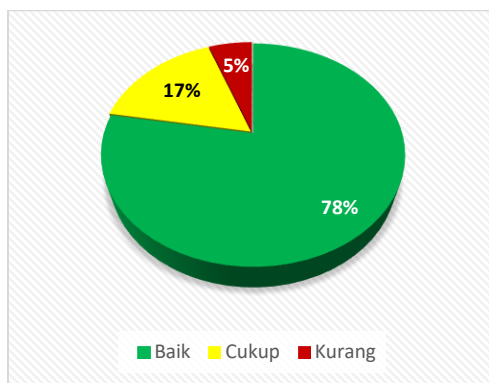
Gambaran Umum Monitoring dan Evaluasi RAN OGI 2020-2022 Semester I – Semester III

Memasuki bulan ke-18 pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia ke-VI periode 2020-2022, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk memastikan keberjalanan implementasi Rencana Aksi Nasional oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

1. Capaian Administratif

Capaian administratif pelaksanaan RAN OGI Semester I – Semester III sebagai berikut:

Gambar 1.
Capaian Administratif Pelaksanaan B18 RAN OGI 2020-2022



Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester I – Semester III

- a. **78% komitmen** mendapat nilai **baik**, yang menunjukkan target capaian sudah dilakukan dengan optimal pada **14** komitmen, yaitu:

Tabel 1.

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Baik

No	Judul Komitmen
1	Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2	Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah
3	Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
4	Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal
5	Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan
6	Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum
7	Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban
8	Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-Program Kesehatan
9	Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa
10	Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

11	Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data
12	Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19
13	Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat
14	Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

- b. **17% komitmen** mendapat nilai **cukup**, yang menunjukkan target capaian belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dan membutuhkan penyelesaian dari masing-masing pelaksana pada **3** komitmen, yaitu:

Tabel 2.

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Cukup

No	Judul Komitmen
1	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!
2	Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum
3	Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi

- c. **5% komitmen** mendapat nilai **kurang**, yang menunjukkan pelaksana belum mampu menyelesaikan seluruh target capaian pada **1** komitmen, yaitu:

Tabel 3.

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Kurang

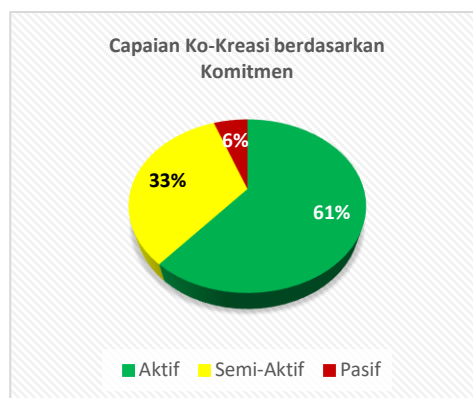
No	Judul Komitmen
1	Keterbukaan Data Beneficial Ownership*

*Penilaian Menggunakan Data BO Stranas PK

2. Proses Ko-Kreasi

Proses Ko-kreasi pelaksanaan RAN OGI Semester I – Semester III adalah sebagai berikut:

Gambar 2.
Proses Ko-kreasi Pelaksanaan RAN OGI 2020-2022 Semester I – Semester III



Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester I – Semester III Tahun 2021

- a. **61% komitmen** dengan capaian ko-kreasi aktif, yang menunjukkan baik Kementerian/Lembaga maupun OMS optimal berkolaborasi pada **11 komitmen**:

Tabel 4.

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Aktif

No	Judul Komitmen
1	Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2	Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah
3	Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
4	Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal
5	Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan
6	Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum
7	Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum
8	Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-Program Kesehatan
9	Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa
10	Keterbukaan Data Beneficial Ownership
11	Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

- b. **33% komitmen** dengan capaian ko-kreasi semi-aktif, yang menunjukkan baik Kementerian/Lembaga maupun OMS belum sepenuhnya optimal berkolaborasi pada **6 komitmen**:

Tabel 5.

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Semi Aktif

No	Judul Komitmen
1	Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban
2	Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi
3	Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu
4	Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data
5	Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19
6	Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat

- c. **6% 1 komitmen** dengan capaian ko-kreasi pasif, yang menunjukkan baik Kementerian/Lembaga maupun OMS belum berkolaborasi pada **1 komitmen**:

Tabel 6.

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Pasif

No	Judul Komitmen
1	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI 2020-2022: SEMESTER I – SEMESTER III

Pelaksanaan RAN OGI 2020-2022 memberikan pembelajaran penting bagi seluruh aktor Pemerintah maupun OMS sebagai pelaksana, dan bagi Sekretariat Nasional OGI sebagai pihak yang memberikan pendampingan serta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi. Pada bagian ini, pembelajaran-pembelajaran tersebut akan dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Refleksi Target Capaian, Refleksi bagi Pelaksana, dan Refleksi bagi Sekretariat OGI. Berikut poin-poin refleksi yang didapatkan dalam pelaksanaan RAN OGI 2020-2022 Semester I – Semester III:

I. Catatan Umum dan Tindak Lanjut Penetapan Target Capaian

Dalam dokumen RAN OGI 2020-2022, Target Capaian bermakna sebagai tindakan atau kegiatan yang perlu dilakukan oleh aktor Pemerintah maupun OMS dalam melaksanakan masing-masing komitmennya. Target Capaian dalam RAN OGI dibagi ke dalam empat bagian, yaitu Target Capaian Semester I (B06), Semester I (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (24). Dalam pelaksanaannya sampai dengan Semester III, terdapat beberapa refleksi dalam penetapan target yang ditemukan, yaitu:

- Beberapa Target Capaian belum memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-based*), sehingga belum bisa secara langsung menyasar ukuran keberhasilan untuk dicapai pada tahun 2022.
- Kriteria penilaian ketercapaian target secara kualitatif maupun kuantitatif belum ditentukan, sehingga belum ada standar yang sama untuk melakukan penilaian.
- Indikator *outcome/impact* dari setiap komitmen belum ditetapkan.

Berdasarkan temuan atas Target Capaian tersebut, maka terdapat beberapa tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan pelaksanaan yang lebih baik pada RAN berikutnya, yaitu:

- Penetapan target RAN selanjutnya diharapkan memenuhi kriteria prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Based*), yaitu:
 - Pengkonkritan target-target dengan redaksional proses menjadi output atau minimal proses dengan kesepakatan kriteria capaian yang lebih berkualitas

- Pendetailan target-target untuk memperjelas peran atau tanggung jawab antara Kementerian/Lembaga dan OMS yang menjadi pelaksana
- Dilaksanakannya penetapan kriteria ketercapaian kualitatif dan kuantitatif yang lebih terukur untuk masing-masing Target Capaian, yaitu:
 - Kriteria penilaian kualitatif:
 - Tahapan/proses lengkap pencapaian target tersebut
 - Hasil sebuah target tercapai secara lengkap atau sempurna
 - Kriteria penilaian kuantitatif:
 - Persentase menggambarkan capaian tahapan/proses dari target tersebut
 - Persentase menggambarkan capaian hasil dari target tersebut.
- Menetapkan kriteria evaluasi berbasis *outcome / impact* sehingga capaian komitmen dapat diukur pada level dampak yang lebih luas terutama kontribusi pada nilai-nilai keterbukaan pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

II. Catatan Umum dan Tindak Lanjut Implementasi Target

Dalam RAN OGI 2020-2022, secara garis besar implementasi target dilakukan oleh dua pelaksana, yaitu Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Masing-masing instansi tersebut memiliki sejumlah Target Capaian yang perlu dilaksanakan dan dicapai setiap semesternya. Pada Monitoring Evaluasi RAN OGI 2020-2022 Semester I – Semester III, terdapat sejumlah catatan umum yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pelaksana dalam mengimplementasikan target yang telah ditentukan, yaitu:

- Proses ko-kreasi atas inisiatif Kementerian/Lembaga maupun OMS semakin membaik. Hal tersebut tergambarkan dari jumlah proses kokreasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil semakin meningkat.
- Adanya keterbatasan sumber daya di Kementerian/Lembaga maupun OMS terutama mengenai realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19. Keterbatasan sumber daya meliputi:
 - Pemotongan anggaran/refocusing biaya baik dari Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil.

Berdasarkan temuan atas Pelaksana tersebut, maka terdapat beberapa tindak lanjut yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana dalam mengimplementasikan RAN OGI, yaitu:

- Dilakukannya penguatan komitmen antar Kementerian/Lembaga dan OMS dalam melaksanakan RAN OGI secara lebih berkualitas, berkesinambungan, dan berdampak.
- Mendorong strategi koreksi yang lebih tinggi oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dari Sekretariat Open Government Indonesia.
- Optimalisasi strategi pendampingan dan monitoring oleh Sekretariat Open Government Indonesia.

TUJUAN, TEMA, DAN KOMITMEN RAN OGI 2020-2022

Dalam rangka mendorong implementasi nilai-nilai keterbukaan pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide dan aksi praktik keterbukaan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Pemerintah/Open Government Indonesia (OGI) periode 2020-2022.

Tema besar RAN OGI periode 2020-2022 disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi Covid 19, yaitu Pemulihan Pasca-Pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19. Tema besar ini bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.” Dalam tema besar ini, ada beberapa isu strategis yang didorong yakni penguatan pelayanan publik, antikorupsi, transparansi fiskal, akses terhadap keadilan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik berspektif gender. Tabel berikut menjelaskan 18 komitmen beserta Kementerian/Lembaga dan OMS pelaksananya:

Tabel 7. Daftar Komitmen beserta Pelaksananya

No	Komitmen	Kementerian/Lembaga dan OMS
1	Komitmen 1: Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Komisi Informasi Pusat (KIP) Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ICW
2	Komitmen 2: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) PATTIRO Seknas FITRA
3	Komitmen 3: Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS Medialink PWYP TII
4	Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yayasan TIFA
5	Komitmen 5 : Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal	Lembaga Administrasi Negara (LAN) Lakpesdam NU
6	Komitmen 6 : Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan	Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM Polisi RI OMS Sektor Keadilan: IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH

		Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, PBHI, YLBHI
7	Komitmen 7 : Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum	Mahkamah Agung BPHN Kementerian Hukum dan HAM OMS Sektor Keadilan: IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, PBHI, YLBHI
8	Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum	BPHN Kementerian Hukum dan HAM OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI
9	Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban	BPHN Kementerian Hukum dan HAM OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI (-)
10	Komitmen 10: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi	BPHN Kementerian Hukum dan HAM Komisi Informasi Pusat OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI (-)
11	Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan	Kementerian Sosial Medialink

12	Komitmen 12: Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) OMS: Seknas FITRA, TII, WVI, Kapal Perempuan, INFID, Medialink, Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi)
13	Komitmen 13: Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Perludem
14	Komitmen 14: Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data	Kementerian Kesehatan (Kemenkes) INFID
15	Komitmen 15: Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Seknas FITRA
16	Komitmen 16: Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI
17	Komitmen 17: Keterbukaan Data Beneficial Ownership	Stranas PK PWYP
18	Komitmen 18: Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS

		OMS: Asosiasi LBH APIK Indonesia, IJRS, YLBHI, SAFEnet
--	--	---

STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

I. Mekanisme Pelaksanaan RAN OGI

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan dua pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan RAN OGI. Dalam pelaksanaan RAN OGI 2020-2022, terdapat 21 Kementerian/Lembaga dan 24 OMS yang memiliki sejumlah target capaian yang perlu untuk dilaksanakan dan dilaporkan setiap semesternya kepada Sekretariat Nasional OGI.

Pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan OMS diharapkan selaras dengan ukuran keberhasilan serta target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN OGI 2020-2022. Lebih dari itu, diharapkan, dalam pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut, Pemerintah bersama dengan OMS dapat mengerjakannya dengan mengedepankan proses ko-kreasi, sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil.

Memasuki periode pelaporan, Pemerintah dan OMS akan memberikan Data Dukung terkait pelaksanaan komitmen melalui dua kanal yang berbeda, yaitu:

- i. SISMONEV Kantor Staf Presiden - bagi Kementerian/Lembaga
- ii. SISMONEV OGI - bagi OMS

II. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAN OGI

Dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan, Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu dari proses tersebut yang perlu menjadi perhatian. Sekretariat Nasional OGI, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan keberjalanan implementasi, memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi RAN OGI 2020-2022. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan waktu Target Capaian, yaitu Semester I (B06), Semester II (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (B24). Hingga dokumen ini diterbitkan, Sekretariat Nasional OGI telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bagi Target Capaian Semester I, Semester II, dan Semester III. Adapun penjelasan terkait kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan akan dijelaskan pada bagian berikut.

1) Pemantauan (*Monitoring*)

Sekretariat Nasional OGI bertugas untuk melaksanakan pemantauan (*monitoring*) secara intensif pada akhir semester berjalan dengan cara:

- Mempelajari laporan data dukung capaian target semester Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil;
- Melakukan konfirmasi apabila dinilai terdapat data dukung maupun hal-hal lainnya yang kurang jelas atau perlu dilengkapi oleh Kementerian Lembaga/ Organisasi Masyarakat Sipil.

Mekanisme pemantauan akan dijalankan oleh Sekretariat Nasional OGI sepanjang waktu target capaian berjalan, hingga pada periode monitoring dan evaluasi RAN OGI 2020-2022 setiap semesternya.

2) Evaluasi

Sekretariat Nasional OGI melaksanakan evaluasi terhadap capaian target yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam memberikan penilaiannya, Sekretariat Nasional OGI tidak hanya melakukan penilaian secara administratif, tetapi juga kualitas pelaksanaan yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan rencana aksi yang dilaporkan memang telah dilaksanakan (tidak sekedar administratif);
- b. Memastikan rencana aksi dilaksanakan dengan kualitas yang baik;
- c. Memastikan rencana aksi akan berkesinambungan;
- d. Memastikan para pelaksana menyadari bahwa rencana aksi membawa perubahan (*output-outcome*);
- e. Memastikan rencana aksi telah mencapai perubahan (*dampak/impact*) tidak hanya bagi pelaksana tapi juga penerima manfaat (masyarakat luas).

Untuk pelaksanaan sampai dengan Semester III, Sekretariat Nasional OGI fokus pada evaluasi pada poin “a” dan “b”. Namun untuk tahun berikutnya, dalam hal ini tahun 2022, Sekretariat Nasional OGI juga akan fokus pada poin “c”, “d”, dan “e”.

Dalam melaksanakan evaluasi hingga Semester III RAN OGI 2020-2022, Sekretariat melakukan analisis yang terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. **Melakukan identifikasi capaian target**, termasuk hambatan yang dialami oleh masing-masing komitmen, mulai dari Ukuran Keberhasilan, hingga Target Capaian masing-masing semester;
- b. **Melakukan identifikasi Ko-kreasi serta Target Semester yang belum terselesaikan**. Sekretariat Nasional OGI akan menganalisis kegiatan Ko-kreasi yang dilakukan masing-masing pelaksana, serta meninjau kembali

pelaksanaan target capaian yang tidak dapat diselesaikan pada periode sebelumnya.

Dalam proses evaluasi RAN OGI 2020-2022, Sekretariat Nasional OGI memberikan beberapa penilaian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penilaian Capaian Administratif

Salah satu komponen penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional OGI ialah penilaian **Capaian Administratif**. Penilaian ini bermakna untuk mengukur hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target-target komitmen. Adapun kriteria penilaian pada bagian ini terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

Skala Nilai	Keterangan
70-100	Baik
51-69	Cukup
0-50	Kurang
N/A	<i>Not Available*</i>

*Target tidak dapat diukur pelaksanaannya karena membutuhkan *support* dari pelaksana lainnya

2. Penilaian Proses Ko-kreasi

Sebagai salah satu mandat dalam pelaksanaan RAN, Sekretariat Nasional OGI menjadikan **Proses Ko-kreasi** sebagai salah satu komponen penilaian. Komponen ini menjelaskan sejauh mana ko-kreasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan komitmen RAN OGI. Adapun kriteria penilaian proses ko-kreasi ialah sebagai berikut:

	Aktif
	Semi-Aktif
	Pasif
	Tidak bisa dilaksanakan, karena bergantung pada pelaksana lainnya

3) Pelaporan

Penyusunan laporan yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional OGI setiap akhir semester, memberikan penekanan maupun sorotan baik secara kualitatif dan kuantitatif terhadap tiga hal, yaitu:

- a. Capaian Administratif
- b. Proses Ko-kreasi
- c. Refleksi

III. Mekanisme Pelengkapan Laporan Capaian Target

Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VI periode 2020-2022 telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Berdasarkan hasil Monev, didapati bahwa terdapat sejumlah target capaian yang telah berhasil dipenuhi sepenuhnya, tetapi juga terdapat sejumlah target capaian yang tidak dapat diselesaikan pada rentang waktu yang telah disepakati dalam dokumen RAN VI OGI periode 2020-2022. Menindaklanjuti kasus tersebut, Sekretariat Open Government Indonesia, akan membuka mekanisme Pelengkapan Laporan Capaian Target baik itu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan juga Kementerian / Lembaga. Mekanisme Pelengkapan Laporan Capaian Target dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Tenaga Ahli Sekretariat Open Government Indonesia.

DESKRIPSI CAPAIAN PELAKSAAN RAN OGI 2020-2022: SEMESTER I – SEMESTER III TAHUN 2021

Dalam pelaksanaan RAN OGI 2020-2022, terdapat 18 komitmen dengan 267 Target Capaian yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Pada pelaksanaannya hingga semester dua, terdapat 131 Target Capaian yang telah dikerjakan oleh Kementerian/Lembaga dan OMS. Adapun hasil capaian dari target tersebut ialah sebagai berikut:

I. Berdasarkan Capaian Administratif Kementerian /Lembaga

Adapun rincian capaian administratif B06, B12, B18, dan akumulasi keseluruhan K/L ialah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Administratif Semester I – Semester III Tahun 2021

Indikator	B06	B12	B18	Akumulasi B06 – B18
Baik (70-100)	26	33	27	86
Cukup (51-69)	0	0	0	0
Kurang (0-50)	7	4	6	17

Kinerja tidak dapat dinilai (N/A)	2	1	0	3
Total	35	38	33	106

Sehingga akumulasi capaian administratif 109 target K/L pada B18 Tahun 2021, yaitu:

1. 81 % (59 target) memiliki kinerja baik
2. 15% (11 target) memiliki kinerja kurang
3. 4 % (3 target) memiliki penilaian N/A

II. Berdasarkan Capaian Administratif Organisasi Masyarakat Sipil

Adapun rincian capaian administratif B06, B12, B18, dan akumulasi keseluruhan OMS ialah sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Administratif Semester I – Semester III Tahun 2021

Indikator	B06	B12	B18	Akumulasi B06 – B18
Baik (70-100)	17	22	15	44
Cukup (51-69)	0	0	0	0
Kurang (0-50)	8	4	7	19
Kinerja tidak dapat dinilai (N/A)	4	3	0	7
Total	29	29	22	70

Sehingga akumulasi capaian administratif 70 target OMS pada B18 Tahun 2021, yaitu:

1. 63% (44 target) memiliki kinerja baik
2. 27% (19 target) memiliki kinerja kurang
3. 10 % (7 target) memiliki penilaian N/A

DESKRIPSI CAPAIAN 18 KOMITMEN RAN OGI 2020-2022
SEMESTER I – SEMESTER III

Komitmen 1

Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ukuran Keberhasilan 1:

Diterbitkannya revisi PERKI SLIP (Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik) yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Komisi Informasi Pusat (KIP)

Target B06: Diterbitkannya dokumen peraturan yang merupakan revisi PERKI SLIP.	Capaian Target: Telah terbit peraturan revisi PERKI SLIP, yaitu PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP yang mendetailkan informasi pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam proses penyusunan PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) secara aktif berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW terlibat mendetailkan informasi pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan.	Aktif
Target B12: 1. Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada	Capaian Target: 1. Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP (PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara daring.	Nilai: 100%

<p>Badan Publik terutama Kementerian/ Lembaga (K/L).</p> <p>2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>2. Setelah PERKI 1/2021 diterbitkan, KIP telah aktif mengundang Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan badan publik untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, agar badan publik dapat membuka data sesuai dengan ketentuan dalam PERKI1/2021. Sosialisasi ini dilakukan bertahap, pertama pada badan publik meliputi K/L, dan Pemerintah Daerah. Kedua, sosialisasi dilakukan pada pihak eksternal yakni BUMN, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Komisi Informasi Daerah, dan OMS.</p> <p>3. Materi sosialisasi sudah menekankan informasi detail pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan, yang sudah ditayangkan juga secara online pada saluran youtube KIP.</p> <p>4. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Daerah telah dilakukan ketika sosialisasi PERKI 1/2021. Kementerian Dalam Negeri sebagai peserta sosialisasi juga diharapkan dapat aktif mendorong keterbukaan di level daerah sesuai dengan PERKI 1/2021.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Sosialisasi telah dilakukan pada OMS.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>Sosialisasi Peraturan revisi PERKI SLIP pada Badan Publik Terutama K/L</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan sosialisasi terhadap 34 Kementerian, 33 Lembaga Non Struktural, dan 45 Lembaga Negara Non Kementerian.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, proses sosialisasi terkait PERKI SLIP 2021 saat ini sedang dilaksanakan oleh masing-masing Badan Publik.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi</p>	<p>Aktif</p>

Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B12: Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Publik.	Capaian Target: ICW telah melakukan sosialisasi PERKI 1/2021 dalam agenda pelatihan ICW di tahun 2021.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi : ICW telah melakukan sosialisasi PERKI 1/2021 dalam agenda pelatihan ICW di tahun 2021. ICW juga aktif mendiseminasikan melalui tulisan misalnya https://www.antikorupsi.org/index.php/id/article/dokumen-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-adalah-informasi-publik	Aktif
Target B18: Sosialisasi Peraturan Revisi PERKI SLIP pada Publik	Capaian Target: ICW telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada kegiatan <i>Open Government Week 2022</i> , pada Kamis, 19 Mei 2022. Selengkapnya terkait kegiatan sosialisasi dapat diakses dalam laman berikut: https://www.youtube.com/watch?v=GwWKO9ctq6I	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: ICW telah melaksanakan kokreasi dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Romanus Ndau Lendong (Komisioner Informasi Pusat), untuk menjelaskan terkait Urgensi Keterbukaan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.		
ICW		

Target B06: Memberikan bantuan dalam menjaring masukan atas opini publik.	Capaian Target: ICW belum memberikan laporan atau kajian terkait masukan publik terkait Indeks Keterbukaan Informasi. Proses Kokreasi : Tidak melaksanakan penjaringan masukan publik terkait Indeks Keterbukaan Informasi.	Nilai: 0% Pasif
KIP		
Target B12: Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) telah dilakukan sepanjang 2020-2021. 2. IKIP 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori berkualitas “sedang”, yang terbangun atas 3 indikator: <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian tertinggi pada Lingkungan Hukum, yaitu ‘jaminan hukum atas akses informasi’ sebesar 79,15. b. Penilaian terendah pada Lingkungan Ekonomi, yaitu ‘transparansi’ sebesar 65,10. c. Sedangkan untuk Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu ‘literasi publik’ sebesar 65,95 serta ‘partisipasi publik’ sebesar 67,29. 3. Berdasarkan daerah, IKIP 2021 menempatkan Provinsi Bali pada peringkat pertama provinsi dengan keterbukaan informasi publik ‘baik’, sedangkan Provinsi Papua Barat pada peringkat akhir provinsi dengan keterbukaan informasi publik ‘buruk’. 4. Berdasarkan karakteristik informan yang disurvei, menunjukkan penilaian tertinggi diberikan oleh informan badan publik negara atau pemerintah, sedangkan informan masyarakat dan pelaku usaha memberikan penilaian terendah pada keterbukaan informasi publik. 5. IKIP 2021 memiliki indikator transparansi dalam bidang dunia usaha yang memiliki sub 	Nilai: 100%

	<p>indikator yakni: pengelolaan anggaran publik dan badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Menurut hasil IKIP, Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki skor baik di bidang ini. Indikator transparansi skor Aceh dalam bidang dunia usaha termasuk kategori situasi baik dengan dua sub indikator: a) tingkat pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dengan skor 82,33; dan b) pengelolaan anggaran publik dan badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan skor 84,89.</p> <p>6. Tidak ada rekomendasi khusus pada LKPP dan pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>KIP telah melibatkan ICW dalam penyusunan IKIP 2021 sebagai narasumber umum, namun tidak khusus dalam hal memberikan masukan terkait metodologi IKIP.</p>	Semi Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 3:</p> <p>Terbukanya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP.</p>		
LKPP		
<p>Target B06:</p> <p>Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah terlaksana persiapan pengembangan <i>mockup</i> portal untuk pencatatan pengadaan dalam kondisi darurat. Portal tersebut akan berisi informasi tentang: Nama Paket, Instansi, Tanggal Pembuatan Paket, Metode Pengadaan, Jenis Pengadaan, Tahun Anggaran, Pagu Anggaran, dan Penyedia Berkontrak. Portal ini dijadwalkan akan selesai pada bulan Desember 2021.</p>	<p>Nilai: 100%</p>

termasuk dalam kondisi darurat.	Proses Kokreasi: Tidak terjadi koordinasi antara ICW dan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.	Pasif
ICW		
Target B06: Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat Nasional.	Capaian Target: ICW tidak dapat melaksanakan target karena tidak adanya koordinasi dari LKPP untuk melakukan rapat pembahasan pengembangan portal Pengadaan Barang dan Jasa dalam kondisi darurat nasional.	Nilai: N/A
	Proses Kokreasi: ICW tidak dilibatkan oleh LKPP untuk berkoordinasi.	N/A
Target B12: Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.	Capaian Target: ICW telah melaksanakan target dengan mengadakan rapat dengan LKPP terkait pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa pada 8 September 2021.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa ICW masih belum bisa terlibat dalam pengembangan portal pengadaaan darurat.	Aktif
Target B18:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	<p>ICW telah melaksanakan koordinasi dengan LKPP pada 17 Juni 2022. Dalam koordinasi tersebut, ICW mendapatkan penjelasan terkait portal pengembangan pengadaan barang/jasa darurat yang dikembangkan oleh LKPP, serta memberikan catatan terkait dengan portal tersebut yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pelibatan unsur masyarakat lainnya, seperti Transparency International Indonesia (TII). • LKPP dapat memperluas jaringan K/L dan Pemerintah Daerah yang menggunakan portal Pengadaan Barang dan Jasa secara darurat. 	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>ICW telah melaksanakan kokreasi dalam bentuk memberikan masukan kepada LKPP terkait dengan fitur serta strategi pengembangan portal Pengadaan Barang/Jasa darurat</p>	Aktif
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
<p>Target (1) B12:</p> <p>Peraturan yang dibuat oleh LKPP sebagai tindak lanjut revisi PERKI SLIP (apabila terdapat perubahan yang perlu ditindaklanjuti dalam peraturan LKPP dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan terkait</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keputusan PPID LKPP 3/2021) dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID LKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan 	Nilai: 90%

pengadaan barang dan jasa).	Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 (Keputusan PPID LKPP 4/2021) masih berupa draft. 2. Draft Peraturan ini telah memberikan daftar informasi dan data terkait PBJ yang wajib dan dikecualikan untuk dibuka pada publik, sesuai dengan PERKI 1/ 2021. Draft ini rencananya akan diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021.	
	Proses Kokreasi: Tidak melibatkan ICW.	Pasif
Target (2) B12: Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.	Capaian Target: Persiapan yang dilakukan melalui : 1. Pengumpulan informasi kebutuhan terkait pengembangan pencatatan pengadaan darurat. 2. Pembuatan mockup pencatatan pengadaan darurat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Pengembangan portal untuk pencatatan pengadaan darurat tidak dilakukan bersama dengan ICW karena pengembangan teknis tampilan website berada di ranah internal.	Pasif
Target (2) B18: Pengembangan Portal Pengadaan Nasional atau Sistem Informasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kondisi Darurat	Capaian Target: LKPP telah mengembangkan versi <i>dummy</i> Portal Pengadaan Barang/Jasa darurat, yang rencananya digabungkan dalam SPSE versi 4.5. Hasil pemantauan Sekretariat OGI telah menemukan fitur "Pencatatan Pengadaan Darurat" dalam portal https://lpse.lkpp.go.id/eproc4	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: LKPP telah melaksanakan Kokreasi dengan ICW melalui adanya pertemuan yang diinisiasi oleh	Aktif

	LKPP pada, Jumat, 17 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut LKPP melaksanakan demo penggunaan portal, serta menerima masukan-masukan dari ICW untuk ditindaklanjuti pada target selanjutnya.	
<p>Tindak Lanjut Menuju B24</p> <p>UK 1:</p> <p>Kokreasi serta sosialisasi terkait dengan UK 1 telah terlaksana dengan Baik. Dalam rangka meningkatkan implementasi dari PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), KIP bersama dengan ICW perlu mendorong Badan Publik untuk menerapkan hal tersebut.</p> <p>UK 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LKPP diharapkan dapat menerima masukan dari ICW, serta mengaplikasikannya dalam portal Pengadaan Barang/Jasa Darurat yang sedang dikembangkan. 2. ICW dan LKPP diharapkan melaksanakan komunikasi yang lebih intensif dalam mengembangkan portal Pengadaan Barang/Jasa Darurat. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan untuk mendorong substansi masukan yang lebih komprehensif dari masing-masing stakeholders. 3. LKPP diharapkan memastikan bahwa Portal Pengadaan Barang/Jasa Darurat dapat segera ditampilkan kepada publik pada B24. 		

Komitmen 2

Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

Ukuran Keberhasilan 1:		
Laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti (target tingkat penyelesaian minimal 45% dari jumlah pengaduan pada tahun 2022).		
Kementerian PAN RB		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR!. 2. Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk Evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR kepada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). 2. Rapat kerja dengan stakeholders lainnya telah dilakukan dengan penekanan evaluasi pada: (1) Penyusunan SK Tim Pengelola; (2) Keaktifan akun K/L/D; (3) Jumlah laporan; (4) Status Tindak Lanjut; dan (5) Kualitas tindak lanjut. 3. Rencana kegiatan ke depan antara lain: (1) Meningkatkan sosialisasi; (2) Menyiapkan bahan sosialisasi; dan (3) Mendorong dilakukan evaluasi admin pada masing-masing instansi. 	
	Proses Kokreasi:	Aktif
	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PAN RB telah melibatkan UI CSGAR, UNDP, USAID. Kedepannya pembahasan penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik melibatkan stakeholder yang lebih luas termasuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). • PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan sumber daya. 	

<p>Target B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder. 2. Jumlah pengaduan melalui SP4N-LAPOR!- yang telah ditindaklanjuti sebanyak 40%. 	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PAN RB telah melaksanakan beberapa rangkain rapat kerja dengan kegiatan berupa (1) Rapat kerja terkait Monev Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Pemda; (2) Rapat Penyusunan dan penandatanganan MoU SP4N-LAPOR; dan 3) FGD dengan organisasi penyandang disabilitas terkait penggunaan SP4N-LAPOR. 2. Terkait jumlah laporan yang ditindaklanjuti, Kementerian PAN RB berhasil memenuhi jumlah laporan yang ditindaklanjuti dengan nilai sebesar 83% dari jumlah aduan yang diterima. Nilai yang ditindaklanjuti ini terdiri dari: 2% Laporan yang sedang dalam proses; 32% Laporan yang telah selesai; dan 49% Laporan yang telah diarsipkan. <p>Proses Kokreasi:</p> <p>PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan dana.</p>	<p>Nilai: 100%</p> <p>Pasif</p>
<p>Target B18:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Menteri PAN RB untuk Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Rapat Kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholders 	<p>Capaian Target</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB telah melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait untuk membahas lokus evaluasi dan pendampingan yang akan dilakukan kepada Pemerintah Daerah. 2. Laporan SP4N-LAPOR! yang telah diterima sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar 43.414 Laporan, dengan jumlah laporan yang telah ditindaklanjuti oleh SP4N-LAPOR! sebesar 33.220 Laporan, atau sebesar 76.52% <p>Proses Kokreasi</p> <p>Proses Kokreasi belum terlihat dalam pelaksanaan ukurang keberhasilan ini.</p>	<p>Nilai: 100%</p> <p>Semi-Aktif</p>

Ukuran Keberhasilan 2:		
Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022).		
Kementerian PAN RB		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR!. 2. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan LAPOR!.	1. Surat Menteri PAN RB telah dikirimkan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang terhubung dengan SP4N-LAPOR!. 2. Kementerian PAN RB telah melakukan pendampingan di: (1) Aceh; (2) Kalimantan Timur; (3) Maluku Utara; (4) NTT; (5) Sulawesi Tenggara; (6) Sulawesi Selatan; (7) Kalimantan Utara; dan (8) Bali. Pendampingan dilakukan berdasarkan hasil Monev 2020, sehingga pemilihan instansi dilakukan berdasarkan performa pengelolaan.	
	Proses Kokreasi:	Aktif
	Kementerian PAN RB telah melakukan kokreasi dengan OMS, tetapi belum melibatkan PATTIRO dalam proses kokreasi tersebut.	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
1. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR!. 2. Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh lembaga pemerintah	1. Kementerian PAN RB telah melakukan pendampingan ke (1) Sulawesi Selatan; (2) Bangka Belitung; (3) Kalimantan Tengah; (4) Kota Palangkaraya; dan (5) Provinsi Bali. Pelatihan dilakukan baik sebagai bentuk Monev, Bimbingan Teknis, serta Training Operator pengelola SP4N-LAPOR di daerah. 2. Jumlah K/L/D yang berhasil menindaklanjuti laporan sebesar 70% atau 1.216 unit penyelenggara. Dengan jumlah Unit Penyelenggara yang berhasil menindaklanjuti sebesar 100% berjumlah 837 Unit Penyelenggara.	
	Proses Kokreasi:	Pasif
	Kementerian PAN RB dengan PATTIRO belum melakukan kokreasi terkait ukuran keberhasilan ini.	

(25% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 40% laporan di tahun 2021).	Hal tersebut dibuktikan dari tidak adanya data yang mendukung bentuk koreksi yang dilakukan antara PATTIRO dengan Kementerian PAN RB.	
Target B18: 1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan LAPOR!	Capaian Target Kementerian PANRB telah melaksanakan pendampingan ke sejumlah Pemerintah Daerah dan mendorong adanya kesepakatan bersama untuk meningkatkan layanan SP4N-LAPOR! dengan hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengembangkan aplikasi sejenis SP4N-LAPOR! di daerah untuk optimalisasi SP4N-LAPOR! 2. Mendorong penyusunan Renaksi SP4N-LAPOR! di daerah 3. Berkomitmen menindaklanjuti laporan SP4N-LAPOR! 4. Meningkatkan kapasitas anggota pengelola SP4N-LAPOR! 5. Proaktif dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SP4N-LAPOR! 	Nilai: 100%
	Proses Koreksi Pendampingan terhadap Pemerintah Daerah belum melibatkan unsur masyarakat sipil untuk memberikan masukan serta pendapatnya atas implementasi SP4N-LAPOR! yang terdapat pada masing-masing Pemerintah Daerah.	Semi-Aktif
PATTIRO		
Target B06: 1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah	Capaian Target: PATTIRO tidak melaksanakan pendampingan serta sosialisasi.	Nilai: 0%
	Proses Koreksi:	Pasif

<p>terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan.</p> <p>2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat.</p>	<p>PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan dana.</p>	
<p>Target B12:</p> <p>1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan.</p> <p>2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR!</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>PATTIRO belum melaksanakan pendampingan secara langsung, tetapi sudah melakukan pemetaan terkait layanan pelaporan pengaduan pelayanan publik yang sudah terhubung dengan SP4N-LAPOR!.</p> <p>Proses Kokreasi:</p> <p>PATTIRO belum berkoordinasi secara langsung terkait pendampingan dan sosialisasi dengan Kementerian PAN RB. Namun telah melaksanakan rapat awal terkait strategi sosialisasi.</p>	<p>Nilai:</p> <p>50%</p> <p>Pasif</p>

kepada masyarakat.		
Target B18: 1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan. 2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat.	Capaian Target: Tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B18 Proses Kokreasi Tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B18	Nilai: 0% Pasif
Ukuran Keberhasilan 3: Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik.		
Kementerian PAN RB		
Target B06: Rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	Capaian Target: 1. Rapat koordinasi sudah dilakukan dengan USAID dan Detech. 2. Informasi yang sudah dibuka: (1) Statistik performa instansi; (2) Kategori laporan; (3) Wilayah laporan; dan (4) Klasifikasi laporan. Proses Kokreasi: Rapat pengembangan fitur laporan data dan informasi belum melibatkan OMS, termasuk PATTIRO.	100% Pasif

Target B12: Pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	Capaian Target: Belum ada pembahasan secara khusus terkait pengembangan lapor dalam Rekapitulasi Laporan Data dan Informasi terkait pengaduan publik.	30%
	Proses Kokreasi: Tidak ada proses kokreasi yang dilakukan antara Kementerian PAN RB dengan unsur Organisasi Masyarakat Sipil.	Pasif
Target B18: Pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik	Capaian Target: Kementerian PANRB telah melaksanakan koordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait dengan migrasi data. Dalam koordinasi tersebut, Kementerian PANRB menjelaskan bahwa akan melaksanakan prioritas pengembangan fitur data sebagaimana dengan dummy yang telah dikerjakan pada periode sebelumnya.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi antara Pemerintah - Organisasi Masyarakat Sipil belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan dari tidak adanya laporan dari OMS terkait dengan Ukuran Capaian ini.	Semi-Aktif
PATTIRO		
Target B06: Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	Capaian Target: PATTIRO belum terlibat dalam pembahasan fitur laporan data dan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: PATTIRO belum diundang dalam rapat pembahasan pengembangan fitur laporan data dan informasi yang ingin dibuka.	N/A

Target B12: Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	Capaian Target: Kementerian PAN RB belum mengundang PATTIRO untuk terlibat langsung dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: PATTIRO belum diundang dalam rapat pembahasan pengembangan fitur laporan data dan informasi yang ingin dibuka.	Pasif
Target B18: Kajian terkait rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik	Capaian Target Tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B18	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi Tidak mengumpulkan Data Dukung untuk B18	Pasif
Tindak Lanjut menuju B24 UK 1: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB berada telah melebihi target pada B24, sehingga perlu dipertahankan. 2. Kementerian PANRB perlu mendorong jumlah laporan selesai yang terdapat di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang memberikan pelaporan. 3. PATTIRO beserta dengan Kementerian PANRB perlu meningkatkan komunikasi untuk menguatkan pelaksanaan kokreasi. UK 2: <ol style="list-style-type: none"> 1. PATTIRO dengan Kemen PANRB perlu melaksanakan proses kokreasi dengan wujud yang lebih konkret, salah satunya melalui diberikannya kesempatan bagi PATTIRO untuk memberikan masukan untuk peningkatan kualitas SP4N-LAPOR! UK 3: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB telah melaksanakan koordinasi dengan KSP terkait dengan prioritas pengembangan fitur laporan data dalam website SP4N-LAPOR! 2. PATTIRO diharapkan segera memberikan masukan dalam bentuk kajian berkaitan dengan informasi maupun data terkait SP4N-LAPOR! apa saja yang perlu segera diterbitkan pada B24. 		

Komitmen 3

Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah

Ukuran Keberhasilan 1:		
Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.		
Kementerian PPN / BAPPENAS		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke daerah untuk memberikan masukan terkait pengembangan rencana aksi di Kota Semarang, Kab. Banggai, Kab. Sumbawa Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Seknas OGI. Dalam hal ini, Sekretariat SDI mengunjungi Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi NTB. Hasil kunjungan berupa asesmen awal terkait kesiapan Pemerintah Daerah dalam rencana aksi Satu Data Daerah, yang kemudian ditelaah lebih lanjut dalam asesmen lanjutan di B12.	
	Proses Kokreasi: 1. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat SDI kedepannya diharapkan mengedepankan proses kokreasi untuk daerah Riau, NTB, dan Jawa Timur. 2. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat OGI telah melibatkan OMS untuk daerah Provinsi NTB, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Aktif
Target B12:	Capaian Target: Pendampingan dilakukan dalam bentuk:	Nilai: 100%

<p>Pendampingan dalam pembentukan rencana aksi di tingkat daerah melalui pilot project di beberapa daerah Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat SDI melakukan asesmen untuk menilai kesiapan daerah dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI. Hasil asesmen tersebut digunakan sebagai dasar menyusun rencana aksi Satu Data di masing-masing daerah. 2. Asesmen tersebut menekankan pada 7 aspek kesiapan daerah meliputi adanya penyusunan regulasi penyelenggaraan SDI daerah, manajemen data, pengelolaan portal, hingga kesiapan data dan infrastruktur untuk Integrasi Portal Daerah ke Portal SDI. Dari segi 7 aspek tersebut, Kota Semarang menunjukkan kesiapan yang paling baik karena hampir semua aspek telah dipenuhi. 3. Sebagai bagian dari persiapan ini, Pemda Riau dan Media Link melakukan mini workshop penyusunan standarisasi data sektoral pada 7 daerah pilot project—yang menjelaskan Standarisasi Data, Integrasi Data Pusat dan Daerah dalam Skema SDI. Hal serupa juga dilakukan oleh pemda lainnya bersama OMS misalnya Provinsi NTB dengan PWYP dan Somasi NTB selaku mitra OMS. 	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Rapat koordinasi asesmen penyelenggaraan SDI di 7 wilayah piloting project telah dilakukan bersama OMS.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18: Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui Pilot Project di Provinsi NTB, RIAu, JAwa Timur, Kota Semarang, Kabupaten</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Satu Data Indonesia telah menyampaikan hasil pelaksanaan asesmen terhadap 7 wilayah <i>pilot project</i> dalam aksi ini secara terpisah. 2. Sekretariat Satu Data bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan 7 Pemerintah Daerah <i>pilot project</i> telah melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Satu Data bersama dalam rangka menyiapkan Pemerintah Daerah dalam implementasi Satu Data Daerah. 	<p>Nilai: 100%</p>

Banggai, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sumbawa Barat	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Sekretariat Satu Data Indonesia bersama dengan OMS. Sekretariat Satu Data Indonesia telah melibatkan OMS dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pembagian tugas dalam implementasi Rencana Aksi Daerah Satu Data Daerah.	Aktif
Media Link		
Target B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Capaian Target: Pendampingan telah dilaksanakan oleh Media Link.	Nilai: 75%
	Proses Kokreasi: 1. Media Link memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan pendampingan di Kabupaten Banggai. 2. Dalam mendampingi Pemda (Riau dan Jawa Timur), Media link belum dilibatkan SDI sehingga Media Link berkoordinasi langsung dengan Pemda.	Semi Aktif
Target B12: Pendampingan penetapan rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi Riau, Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Capaian Target: Pendampingan telah dilaksanakan dengan memetakan tantangan di masing-masing daerah <i>pilot project</i> .	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: 1. Media Link telah melakukan pendampingan dengan catatan sebagai berikut: a. Tantangan di Provinsi Jawa Timur: forum data sulit dibentuk. b. Tantangan di Provinsi Riau: <ul style="list-style-type: none"> • Data prioritas sektoral terkait SDA masih sulit dikumpulkan, portal data masih berisi ringkasan informasi. 	Aktif

	<ul style="list-style-type: none"> • Data keuangan belum ada panduan dari pusat. • Keterlibatan masyarakat sipil masih minim di tahap produksi data. <p>2. Media Link mendorong terciptanya kebijakan satu data dengan memperhatikan pelibatan masyarakat dan kokreasi dalam setiap prosesnya serta menjadikan satu data sebagai acuan dalam melakukan pengawasan yang efektif.</p> <p>3. Untuk Kabupaten Banggai dan Kabupaten Brebes, pendampingan yang telah dilakukan Media Link adalah dalam pembuatan rencana aksi satu data.</p>	
Target B18: Pendampingan implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di Provinsi Riau, Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah mengikuti pendampingan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Daerah</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi</p> <p>Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah, CSO dengan Sekretariat SDI melakukan penyusunan secara bersama-sama melalui meeting yang difasilitasi Sekretariat OGI</p>	Aktif
Publish What You Pay (PWYP)		
Target B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB.	<p>Capaian Target:</p> <p>PWYP sudah mendampingi provinsi NTB bersama dengan Sekretariat OGI.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>PWYP sudah mendampingi provinsi NTB bersama dengan Sekretariat OGI.</p>	Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Pendampingan penetapan rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB.	PWYP telah melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. PWYP telah melakukan pendampingan dengan catatan sebagai berikut: Strategi yang harus dilakukan untuk mempercepat penetapan Rencana Aksi Satu data NTB adalah dengan segera menetapkan Pergub Satu data NTB, dan setelahnya penyusunan rencana aksi dapat dilakukan secepatnya. 2. PWYP telah bekerjasama dengan SDI dalam melakukan pendampingan pada Pemprov NTB melalui pelaksanaan asesmen untuk menilai kesiapannya dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI. 	Aktif
Target B18: Pendampingan implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di Provinsi NTB	Capaian Target: Telah mengikuti pendampingan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Daerah	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah, CSO dengan Sekretariat SDI melakukan penyusunan secara bersama-sama melalui meeting yang difasilitasi Sekretariat OGI	Aktif
Transparency International Indonesia (TII)		
Target B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Kota Semarang.	Capaian Target: TII sudah mendampingi Kota Semarang bersama dengan Sekretariat OGI.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: TII sudah mendampingi Kota Semarang bersama dengan Sekretariat OGI.	Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Pendampingan penetapan rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Kota Semarang.	TII telah bekerjasama dengan SDI dalam melakukan pendampingan pada Pemkot Semarang melalui pelaksanaan asesmen untuk menilai kesiapannya dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI.	
	Proses Kokreasi: TII telah melakukan pendampingan di Kota Semarang dengan catatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan temuan sementara, terlalu banyak aplikasi dalam pengelolaan data bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah pusat. • Persoalannya, aplikasi yang tersedia tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem satu data di Kota Semarang. Perkembangan baik dalam pengelolaan data dalam Dashboard Vaksin, Pemerintah Kota Semarang memberikan informasi yang sangat detail dalam Dashboard Vaksin. 	Aktif
Target B18: Pendampingan implementasi rencana aksi Satu Data Indonesia di Kota Semarang	Capaian Target: Telah mengikuti pendampingan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Daerah	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah, CSO dengan Sekretariat SDI melakukan penyusunan secara bersama-sama melalui meeting yang difasilitasi Sekretariat OGI	Pasif
Tindak Lanjut menuju B24: Sekretariat SDI bersama dengan OMS perlu melaksanakan Rencana Aksi Daerah Satu Data Daerah di masing-masing daerah <i>Pilot Project</i> agar implementasi Satu Data di Daerah dapat terlaksana.		

Komitmen 4

Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Ukuran Keberhasilan 1:		
Menguatnya kapasitas masyarakat dan pendamping desa untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.		
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT)		
Target B06: Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: -
Target B12: Tidak ada target B12.		Nilai: -
Target B18: Fasilitasi untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Masyarakat dan Pendamping Desa		Nilai: 100%
Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pendamping desa untuk mendukung uji coba Program Review Berbasis Masyarakat. Kedepannya Kementerian Desa PDTT dapat terus terlibat dalam pengembangan konsep ini agar selaras dan saling melengkapi dengan konsep akuntabilitas sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT dalam platform Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).		
	Proses Kokreasi: Kementerian Desa PDTT telah melaksanakan Kokreasi dengan Yayasan TIFA secara aktif. Kokreasi dilakukan mulai dari penentuan desa piloting, hingga implementasi program	Aktif
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06: Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan	Nilai: -

Target B12: Tidak ada target B12.	Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai:-
Target B18: Fasilitas untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD	Capaian Target: Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD terkait dengan pelaksanaan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat. Proses Kokreasi: Proses Kokreasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Organisasi Masyarakat Sipil belum dilaksanakan maksimal. Program Bimtek belum melibatkan elemen OMS.	Nilai: 100% Semi-Aktif
Yayasan Tifa		
Target B06: Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: -
Target B12: Sosialisasi dan pelatihan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping desa.	Capaian Target: Desa yang ditetapkan sebagai <i>pilot project</i> adalah Desa Guwosari dan Desa Sriharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi telah dilakukan dengan dua metode, yaitu secara daring dan luring. Proses Kokreasi: Yayasan Tifa bersama Atmawidya Alterasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa PDTT terkait kegiatan sosialisasi yang akan dihadiri oleh Kepala dan Perangkat Desa; Warga Desa; Anggota BPD, serta Pendamping Lokal Desa.	Nilai: 100% Aktif

Target B18: Terlaksananya bimbingan teknis Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Capaian Target: Yayasan TIFA telah melaksanakan bimbingan teknis terkait Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat. Dikarenakan kendala mobilitas selama pandemi, Yayasan TIFA dibantu oleh mitra Yayasan Tifa yang ada di Yogyakarta, Atmawidya Alterasi. Bimbingan Teknis juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Desa PDTT.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Yayasan TIFA telah melibatkan Kementerian Desa PDTT dalam pelaksanaan Evaluasi Program pembangunan Berbasis Masyarakat. Pelibatan dalam bentuk undangan serta penentuan desa <i>pilot project</i>	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di dua desa.		
Kementerian Desa PDTT		
Target B06: 1. Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat. 2. Rekomendasi penetapan lokasi desa untuk pilot project Evaluasi	Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan <i>pilot project bersama Yayasan TIFA sebagai lead implementer</i> Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kokreasi telah terjadi dengan adanya koordinasi antara Kementerian Desa PDTT dan Yayasan TIFA.	Aktif

Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.		
Target B12:	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: -
Tidak ada target B12.		N/A
Target B18:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Fasilitas Pelaksanaan Pilot Project evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Kemendesa PDTT bersama dengan Yayasan TIFA telah melakukan fasilitas kegiatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut Kemendesa PDTT hadir untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan tersebut.	
	Proses Kokreasi:	Aktif
	Proses Kokreasi antara Kemendesa PDTT dengan Yayasan TIFA sudah berjalan dengan baik. Kokreasi dilakukan sejak penentuan desa pilot project hingga implementasi pelaksanaan program	
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06:	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	Nilai: -
Tidak ada target B06.		N/A
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam komitmen ini terkait persiapan <i>pilot project</i> Evaluasi Program Pembangunan.	
	Proses Kokreasi:	Aktif
	Rapat koordinasi dilaksanakan bersama Kementerian Desa PDTT dan Yayasan TIFA sebagai stakeholder terkait dalam komitmen ini.	

Target B18: Fasilitas untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD	Capaian Target: Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD. Namun, sosialisasi tersebut belum dilaksanakan pada desa yang menjadi <i>Pilot Project</i> dalam komitmen bersama Yayasan TIFA dan Kementerian Desa PDTT	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kementerian Dalam Negeri belum melaksanakan Kokreasi dengan Yayasan TIFA maupun Kementerian Desa PDTT. Hal tersebut menggambarkan dari belum dilaksanakannya sosialisasi pada Aparatur Desa <i>Pilot Project</i> pada Komitmen ini.	Pasif
Yayasan Tifa		
Target B06: Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa.	Capaian Target: Penetapan <i>pilot project</i> akan dilakukan pada B12.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: 1. Yayasan Tifa bersama Kemendes PDTT telah melakukan koordinasi persiapan dan penetapan 2 desa pilot project. 2. Namun mengacu pada surat yang dikirimkan oleh Yayasan TIFA kepada sekretariat OGI, capaian B06 terkait pemilihan desa akan dimundurkan ke B12.	Semi Aktif
Target B12: 1. Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa.	Capaian Target: Yayasan TIFA telah melakukan persiapan untuk kegiatan ujicoba, sosialisasi, dan pelatihan terkait penyelenggaraan program review di Kabupaten Bantul.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Desa yang terpilih sebagai <i>pilot project</i> yaitu Desa Guwosari dan Desa Sriharjo Kabupaten Bantul,	Aktif

2. Terpilihnya desa yang merupakan hasil koordinasi dari K/L dan Yayasan TIFA.	berupa koordinasi, ujicoba, sosialisasi, dan pelatihan tahap I program review secara daring dan luring bersama Japan Initiative dan Atmawidya Alterasi Indonesia, dengan dihadiri Kepala dan Perangkat Desa; Warga Desa; Anggota BPD, serta Pendamping Lokal Desa.	
Target B18: 1. Pelaksanaan Pilot Project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Review	Capaian Target: <p>Yayasan TIFA telah melaksanakan Uji Coba Program Review. Metode pelaksanaan Program Review mereplikasi pelaksanaan di Jepang, dari dua Desa percontohan metode tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Adapun catatan lainnya, meskipun disambut baik oleh masyarakat dan Pemdes karena menghadirkan diskusi dan evaluasi yang terbuka, perlu dilakukan pengawasan terkait tindak lanjut dari hasil Program Review ini, khususnya dari Lurah ke tingkat Kabupaten. Kedepannya TIFA dapat berkoordinasi dengan Kemendesa PDTT terkait replikasi Program Review di Desa lainnya.</p> <p>Yayasan TIFA telah melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan Uji Coba Program Review di dua Desa percontohan. Kedepannya TIFA dapat mengembangkan sebuah modul terkait implementasi Program Review yang telah disesuaikan dengan konteks pelaksanaan di Indonesia sesuai dengan pengalaman uji coba. Modul ini juga dapat digunakan untuk melaksanakan Uji Coba lanjutan di Desa lainnya</p>	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi:	Aktif
Tindak Lanjut menuju B24:		
1. Kementerian Dalam Negeri perlu melaksanakan koordinasi dengan Yayasan TIFA dan Kementerian Desa PDTT untuk menyelaraskan terkait agenda		

peningkatan kapasitas Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan BPD agar sesuai dengan Desa *Pilot Project* di Yogyakarta.

2. Kementerian Desa PDTT dengan Yayasan TIFA perlu segera mempersiapkan hasil pembelajaran dari Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat untuk dilaporkan pada B24.

Komitmen 5

Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal

Ukuran Keberhasilan 1:		
Terlaksananya diseminasi "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal"		
Lembaga Administrasi Negara		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Diseminasi pada tahap <i>diagnose/design</i> kegiatan Laboratorium Inovasi (4 daerah).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah melakukan diseminasi tahap <i>diagnose/design</i> kegiatan Laboratorium Inovasi di 4 daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kab. Kepulauan Tanimbar. b. Kab. Lombok Utara. c. Kab. Tojo Una-Una. d. Kab. Sorong. 2. Bahan diseminasi menggunakan bahan terkait inovasi layanan publik yang disiapkan oleh LAN dan diperkaya dengan bahan terkait layanan publik bagi kelompok Marjinal dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (Lakpesdam PBNU). 	
	Proses Kokreasi:	Aktif
	LAN telah melakukan koordinasi dengan Lakpesdam PBNU mengenai bahan yang akan didiseminasikan pada kegiatan Laboratorium Inovasi di 4 daerah.	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Penyusunan Laporan hasil Diseminasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAN telah menyusun laporan pelaksanaan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal yang menjelaskan progres pelaksanaan laboratorium di 4 lokus 2. Kelompok sasaran inovasi terdiri atas perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat miskin, orang dengan disabilitas, masyarakat dengan yang kesulitan karena kondisi geografis, serta masyarakat lansia, baik dari sektor sosial, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 	

	<p>anak, sosial, penataan ruang, dan ketenagakerjaan.</p> <p>3. Terdapat 19 inovasi di 4 lokus kelompok marginal, yaitu:</p> <p>a. Kabupaten Kepulauan Tanimbar Inovasi untuk kelompok marginal (termasuk yang marginal karena akses) yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat 5 inovasi. Inovasi-inovasi tersebut dihasilkan oleh Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMMD); dan Dinas Pendidikan.</p> <p>b. Kab. Lombok Utara Jumlah inovasi untuk kelompok marginal yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebanyak 7 inovasi. Dinas atau unit kerja pengusul inovasi untuk kelompok marginal juga variatif, yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; DP2KBPMMD; Rumah Sakit Umum Daerah; dan Puskesmas.</p> <p>c. Kab. Tojo Una-Una Jumlah inovasi yang dihasilkan untuk kelompok marginal sebanyak 5 inovasi. Inovasi-inovasi tersebut berasal dari Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat; Puskesmas; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan DP2KBPMMD.</p> <p>d. Kab. Sorong Ada 2 inovasi untuk kelompok marginal yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>	
--	---	--

	Proses Kokreasi: Proses pelaksanaan dan penyusunan laporan telah melibatkan Lakpesdam PBNU yang memberikan materi terkait kelompok marginal dalam penyusunan bahan paparan untuk laboratorium inovasi.	Aktif
Target B18: Diseminasi pada tahap diagnose/design kegiatan Laboratorium Inovasi (4 Daerah)	Capaian Target: Lembaga Administrasi negara telah melaksanakan Diseminasi pada tahap Diagnose di 4 Daerah, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Merauke. Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode <i>blended learning</i> dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam hal ini Lakpesdam PBNU untuk memberikan pengantar terkait Inovasi Pelayanan Publik bagi kelompok Marginal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi telah dilaksanakan dengan baik oleh LAN dengan melibatkan Lakpesdam PBNU untuk memberikan paparan mengenai inovasi pelayanan publik untuk kelompok marginal, serta melibatkan Lakpesdam PBNU dalam sesi <i>coaching clinic</i> .	Aktif
Lakpesdam PBNU		
Target B06: Ekspos hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marginal untuk LAN.	Capaian Target: Lakpesdam PBNU telah memaparkan hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marginal kepada LAN.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Paparan dari Lakpesdam PBNU digunakan oleh LAN untuk dipaparkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 4 daerah pendampingan.	Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

<p>Pemetaan dan perumusan materi strategi pendampingan.</p>	<p>Dari 4 (empat) wilayah yang mendapat pendampingan dari Laboratorium Inovasi (Labinov) LAN tahun 2020-2022 yakni Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tojo Uno-Uno. Terpetakan 8 (delapan) kluster inovasi layanan untuk kelompok marginal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kluster disabilitas yakni Care ODD (Peduli Orang Dengan Disabilitas) di Kepulauan Tanimbar; b. Kluster anak yakni KUBE APUS (Kelompok Usaha Bersama Anak Putus Sekolah) dan ADAUT (Ada Rumah Pintar) di Kepulauan Tanimbar, Bersinergi dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak dan Stunting di Lombok Utara, dan Satgas KIBBAR (Satuan Tugas Kesehatan Ibu, Balita, Anak, dan Remaja) di Tojo Una-Una; c. Kluster perempuan yang merangkul perempuan korban kekerasan dan perempuan miskin serta perempuan sebagai kelompok marginal dalam aspek sosial politik masyarakat seperti Peta Daya Perempuan Tanimbar Berdaya di Kepulauan Tanimbar, Budame Miskin (budidaya udang Vaname sistem kolam bundar bagi perempuan miskin pesisir Kabupaten Lombok Utara) serta Beragak Perempuan di Lombok Utara; d. Kluster masyarakat adat seperti Kokore Kodara (Kokore Ko Sodara) di Sorong; e. Kluster PMKS seperti Satgas PMKS (Satuan Petugas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Lombok Utara; f. Kluster masyarakat pulau terpencil seperti Nyatfar Kreatif di Lombok Utara dan Dokter Masuk Pulau di Tojo Una-Una; g. Kluster lansia seperti Kelas Teras (Kelompok Lansia Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional) di Lombok Utara dan Gerakan Cinta Lansia di Tojo Una-Una; dan 	
---	--	--

	h. Kluster masyarakat miskin seperti Si Abang Tersipu (Sistem Informasi Bangunan Terintegrasi Sistem Informasi Penduduk Miskin) di Tojo Una-Una.	
	Proses Kokreasi: Beragam strategi bisa ditempuh dalam pendampingan kelompok marginal sehingga inovasi yang dilakukan dapat terwujud dan tepat sasaran. Strategi yang dimaksud antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. pemetaan aktor-aktor yang bisa mendukung inovasi oleh OPD terkait. b. sinergi sesama dinas terkait untuk mengatasi keterbatasan nomenklatur dan keterbatasan birokrasi lainnya. c. kolaborasi dengan komunitas atau organisasi setempat untuk mencapai tujuan mutlak dilakukan agar inovasi layanan dapat mencapai tujuan. 	Aktif
Target B18: Pemantauan Pendampingan	Capaian Target Lakpesdam PBNU ikut terlibat dalam rangkaian <i>coaching clinic diagnose</i> Laboratorium Inovasi yang diselenggarakan oleh LAN. Adapun catatan dari pemantauan yang dilaksanakan oleh Lakpesdam PBNU adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi dari unsur masyarakat yang lebih luas untuk inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. 2. Kurangnya pemahaman dari Pemerintah Daerah terkait kelompok marjinal yang menjadi sasaran pelayanan publik. 3. Inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah belum banyak menjadikan kelompok marjinal sebagai salah satu targetnya. 	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Lakpesdam PBNU telah melaksanakan Kokreasi dengan baik bersama dengan LAN. Berdasarkan	Aktif

	hasil pemantauan, Lakpesdam PBNU aktif dalam mendorong OPD untuk menyiapkan Inovasi Pelayanan Publik bagi kelompok marjinal.	
Tindak Lanjut menuju B24: <ul style="list-style-type: none">• Lembaga Administrasi Negara dengan Lakpesdam PBNU telah melaksanakan Kokreasi dengan baik. Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam mendorong hadirnya inovasi pelayanan publik bagi kelompok marjinal telah tergambarkan dalam kegiatan <i>coaching clinic</i> yang dilaksanakan oleh LAN dan Lakpesdam PBNU.• LAN bersama dengan Lakpesdam PBNU perlu memastikan dorongan terkait Inovasi Pelayanan Publik bagi kelompok marjinal benar-benar dapat terimplementasikan dalam usulan Inovasi Pelayanan Publik dari masing-masing Pemerintah Daerah.		

Komitmen 6

Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan

Ukuran Keberhasilan 1:

Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Ditjen PAS Kemenkumham, dan Polri.

Mahkamah Agung

Target B06:

1. Surat Keputusan Dirjen Badilag dan Keputusan Dirjen Badilum tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
2. Pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Capaian Target:

MA telah menyusun Peraturan Teknis dalam Keputusan Dirjen Badilag (Badan Peradilan Agama) dan Keputusan Dirjen Badilum (Badan Peradilan Umum) tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

Nilai: 100%

Proses Kokreasi:

Dalam proses pemenuhan B06, MA telah melibatkan unsur non-pemerintah, yakni Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) untuk memberikan masukan dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak. Dirjen Badilag bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyusun SK Ditjen Badilag.

Aktif

<p>Target B12:</p> <p>Draft SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badimiltun) terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah disusunnya Draft SK Ditjen Badimiltun terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p> <p>Proses Kokreasi:</p> <p>Badimiltun telah melakukan MoU dengan Sabda untuk mengirimkan pelatihan pada Aparat Penegak Hukum, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana bagi disabilitas.</p>	<p>Nilai: 100%</p> <p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>1. SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas</p> <p>2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah tersedia SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, capaian administratif hanya mencapai 70% karena SE Sekretaris Mahkamah Agung masih dalam pembahasan pimpinan.</p> <p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam penyusunan SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, MA telah melibatkan Sabda.</p>	<p>Nilai: 70%</p> <p>Aktif</p>
<p>Kejaksanaan Agung</p>		

<p>Target B06:</p> <p>Penyusunan draft pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kejari telah mengumpulkan draft pemetaan yang berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. b. Cara mewujudkan pengadilan yang inklusif. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sudah dilibatkan dalam mediasi terkait pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan. 2. IJRS sudah masuk dalam Pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021. 	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Kajian terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan RI telah menghasilkan kajian terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan. 2. Kajian yang dihasilkan berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. asesmen kebutuhan akomodasi, hambatan yang sering dialami oleh penyandang disabilitas saat proses prapenuntutan hingga penuntutan; dan b. mekanisme yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui peradilan inklusif guna terwujudnya pengakuan penyandang disabilitas sebagai pihak yang setara saat 	<p>Nilai: 100%</p>

	berhadapan dengan hukum di dalam proses penuntutan.	
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. IJRS sudah dilibatkan dalam mediasi terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan. 2. IJRS sudah masuk dalam pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021. 	Aktif
Target B18 Penyusunan draft Peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang	Capaian Target Kejaksaan Agung sudah mengumpulkan draft Peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Nilai: 100%

disabilitas	Proses Kokreasi: Kejaksan Agung telah melibatkan IJRS dalam diskusi terkait draft Peraturan.	Aktif
Ditjen PAS Kemenkumham		
Target B06: Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Capaian Target: Telah tersedia SOP dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Lembaga masyarakat.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam proses pemenuhan B06 telah melibatkan unsur non-pemerintah, yaitu Asia Foundation dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII dalam proses pembuatan kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana akomodasi yang layak.	Aktif

<p>Target B12:</p> <p>Tersedianya peraturan teknis terkait dengan SOP dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Lembaga pemasyarakatan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dibentuknya <i>piloting</i> Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat persiapan tentang Bimbingan Teknis. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas bagi Petugas Pemasyarakatan diikuti oleh perwakilan Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat Keamanan dan Ketertiban, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, dan The Asia Foundation. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis dengan PUSHAM UII dan The Asia Foundation.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B18:</p> <p>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dilaksanakan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak sesuai dengan peraturan teknis yang dibuat mengenai ULD pada UPT Pemasyarakatan. Juga telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait peraturan yang sebelumnya disusun.</p>	<p>Nilai: 100%</p>

	Proses Kokreasi: Untuk B18, Ditjenpas tidak melaporkan apakah pencapaian target dilakukan dengan proses kokreasi.	N/A
Kepolisian Republik Indonesia		
Target B06: 1. Penyusunan SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. 2. Penyusunan buku panduan bagi penyidik terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Capaian Target: 1. Telah tersusun SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak. 2. Telah tersusun buku panduan bagi penyidik terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Namun, Kepolisian RI tidak mengumpulkan data dukung.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Dalam penyusunan SOP Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).	Aktif
Target B12: 1. Tersedianya SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Capaian Target: 1. Telah tersedia SOP pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. 2. Telah tersedia Buku Panduan terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Nilai: 100%

2. Tersedianya buku panduan bagi penyidik terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	Proses Kokreasi: Dalam penyusunan SOP Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).	Aktif
Target B18: Penyusunan Peraturan Kabareskrim Polri terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas.	Capaian Target: Telah tersusunnya draft Peraturan Kabareskrim tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum di Kepolisian.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Kepolisian RI juga dibantu oleh UII dan AIPJ dalam penyusunan draft Peraturan.	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Target B06: 1. Keterlibatan dalam proses pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga (K/L). 2. Tersedianya masukan terhadap	Capaian Target: 1. IJRS telah terlibat dalam proses pemetaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI. 2. Masukan IJRS terhadap pemetaan ialah sebagai berikut: hambatan paling banyak adalah dari luar individu penyandang disabilitas, yaitu dari lingkungannya, infrastruktur, paradigma masyarakat hingga budaya hukum yang belum mengakomodir kebutuhan.	Nilai:100%

pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di K/L.	Proses Kokreasi: IJRS menjadi bagian dari tim pemetaan yang dibuktikan melalui SK Kejaksaan Agung No. 166 Tahun 2021.	Aktif
Target B12: Keterlibatan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di K/L.	Capaian Target: IJRS sudah dilibatkan dalam mediasi terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: 1. IJRS sudah masuk dalam Pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021. 2. IJRS belum mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya: Polri, MA, Lapas.	Aktif
Target B18: Keterlibatan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga	Capaian Target: IJRS sudah dilibatkan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas oleh Kejaksaan Agung.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: 1. IJRS sudah dilibatkan dalam diskusi bersama Kejaksaan Agung	Aktif
Tindak Lanjut menuju B24: 1. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Mahkamah Agung terkait pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan melakukan laporan pelaksanaan SE Sekretariat Mahkamah Agung tersebut pada periode berikutnya. 2. Kejaksaan RI telah menyusun draft Peraturan Kejaksaan Agung terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang		

- disabilitas, yang dilakukan bersama IJRS. Di periode berikutnya, Peraturan Kejaksaan Agung tersebut sudah harus tersedia.
3. Kepolisian RI telah menyusun draft Peraturan Kabareskrim Polri terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas bersama HWDI, UII dan AIPJ. Di periode berikutnya, Peraturan Kabareskrim Polri tersebut sudah harus tersedia.
 4. Kemenkumham (Ditjenpas) telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan SOP yang disusun pada periode B12. Di periode berikutnya, perlu dilakukan asesmen terkait hasil pelaksanaan tersebut.
 5. OMS Sektor Keadilan telah dilibatkan dalam penyusunan draft peraturan di Kementerian/Lembaga. Di periode berikutnya, perlu dilakukan kajian dan asistensi terkait asesmen kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga.

Komitmen 7

Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi		
Mahkamah Agung		
Target B06: Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara Kementerian/Lembaga (K/L).	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung (MA) RI telah memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) disamping beberapa sistem aplikasi berbasis web lainnya. 2. MA dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham telah memiliki MoU terkait portal informasi bersama di tahun 2016. 3. Sebagai bentuk tindak lanjut MoU tersebut, BPHN telah mengadakan rapat diskusi peninjauan revitalisasi kerja sama dengan MA di awal tahun 2021. 	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS belum dilibatkan dalam proses kokreasi	Pasif

Target B12: Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Capaian Target: 1. Telah ada rapat koordinasi Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badimiltun) MA dengan BPHN yang mendiskusikan rancangan pengembangan portal informasi, dengan fokus mengenai langkah persiapan point-point informasi yang dapat menjadi konsumsi publik berkaitan dengan Bantuan Hukum serta langkah-langkah pengintegrasian. 2. Perlu ada koordinasi di dalam internal antara MA untuk menyepakati pengembangan portal ini.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS belum dilibatkan.	Pasif
Target B18: Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi	Capaian Target: Mahkamah Agung RI telah mengidentifikasi portal apa yang sudah ada saat ini dan melakukan diskusi dengan BPHN dan OMS untuk mendiskusikan hal-hal yang dapat dimuat dalam portal informasi Bantuan Hukum. Namun, capaian ini hanya mendapat nilai administratif 50 karena belum tercapai kesepakatan antar pihak dan portal informasi terintegrasi belum dikembangkan.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: Untuk B18, Mahkamah Agung RI tidak melaporkan apakah pencapaian target dilakukan dengan proses kokreasi.	N/A

BPHN Kemenkumham		
Target B06: Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara K/L.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN telah memiliki suatu sistem aplikasi berbasis web dengan nama Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBankum) yang dikelola oleh BPHN dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Pemberi Bantuan Hukum sebagai <i>user</i>. 2. MA dan BPHN Kemenkumham telah memiliki MoU terkait portal informasi bersama di tahun 2016. 3. Sebagai bentuk tindak lanjut MoU tersebut, BPHN telah mengadakan rapat diskusi penjajakan revitalisasi kerja sama dengan MA di awal tahun 2021. 4. Target komitmen untuk perluasan akses dan kapasitas layanan bantuan hukum tercapai melalui adanya proses verifikasi dan akreditasi OBH baru serta reakreditasi terhadap OBH yang sudah ada. Proses akreditasi dan verifikasi OBH baru penting untuk memperluas jangkauan bantuan hukum yang dapat diperoleh masyarakat. Selain itu, penting memastikan terjaganya kualitas pelayanan atas bantuan hukum yang diberikan oleh OBH kepada masyarakat agar berfungsi sebagaimana mestinya melalui proses reakreditasi OBH yang sudah ada. Namun, perlu adanya data yang menunjukkan jumlah OBH yang terdapat di suatu daerah, baik OBH yang dinyatakan lulus akreditasi dan verifikasi sebagai OBH baru maupun reakreditasi 	Nilai: 100%

	OBH yang sudah ada untuk mengetahui kemudahan masyarakat memperoleh akses layanan bantuan hukum di setiap daerah.	
	Proses Kokreasi: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan BPHN telah melakukan pertemuan untuk membahas tentang pengembangan portal informasi hukum.	Aktif
Target B12: Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada rapat koordinasi antara BPHN dengan Badimiltun MA yang mendiskusikan rancangan pengembangan portal informasi, dengan fokus mengenai langkah persiapan point-point informasi yang dapat menjadi konsumsi publik berkaitan dengan Bantuan Hukum serta langkah-langkah pengintegrasian. 2. Rapat dilakukan atas undangan dari BPHN. 	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN menggunakan hasil Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia pada Tahun 2019 yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) di wilayah provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan sebagai dasar untuk	Aktif

	mengembangkan portal informasi bantuan hukum sebagai layanan satu pintu.	
Target B18: Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi	Capaian Target: BPHN telah mengadakan pendalaman mengenai portal yang sudah ada dan mengulas jenis layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014. BPHN juga sudah melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan OMS untuk mendiskusikan hal-hal yang dapat dimuat dalam portal informasi Bantuan Hukum. Namun, capaian ini hanya mendapat nilai administratif 50 karena belum tercapai kesepakatan antar pihak dan portal informasi terintegrasi belum dikembangkan.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan YLBHI, PBHI, IJRS, dan LBH APIK dalam diskusi terkait pelaksanaan capaian.	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.		
Target B06: 1. Pemetaan kebutuhan data-data yang akan dibuka baik dalam portal informasi BPHN	Capaian Target: OMS belum menyusun pemetaan dan kajian terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi:	Pasif

<p>maupun lintas kementerian.</p> <p>2. Tersedianya kajian dan masukan terkait data kebutuhan dalam portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.</p>	<p>Koordinasi baru terjadi antara PBHI dengan BPHN, sedangkan dengan MA tidak terjadi.</p>	
<p>Target B12:</p> <p>Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terbuka.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>IJRS telah melakukan Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia pada Tahun 2019 yang dilakukan di wilayah provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 89,5% responden di Provinsi Lampung dan 92,3% responden di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengetahui adanya Organisasi Bantuan Hukum.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Berdasarkan hasil survei, rekomendasi yang diberikan ialah, perlu adanya portal informasi bantuan hukum sebagai layanan satu pintu yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Portal ini nantinya bertujuan untuk memberikan layanan pencarian informasi ataupun layanan konsultasi terkait bantuan hukum.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Tindak Lanjut Menuju B24:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung dan BPHN perlu melakukan pendalaman lebih lanjut agar ada kesepakatan terkait apa saja yang ingin dikembangkan dalam portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi. Di periode berikutnya, portal informasi tersebut juga sudah harus diuji coba dan dievaluasi. 2. Dalam melakukan pendalaman tersebut, Mahkamah Agung dan BPHN perlu melibatkan OMS Keadilan secara aktif. 		

Komitmen 8

Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

Ukuran Keberhasilan 1: Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum.		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: Penjaringan OBH baru yang akan diverifikasi dan diakreditasi (dalam bentuk sosialisasi dan pendataan).	Capaian Target: BPHN telah melakukan identifikasi terkait calon organisasi bantuan hukum di setiap Kantor Wilayah Kemkumham di 33 Provinsi.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS telah membantu BPHN dalam melakukan sosialisasi penjaringan OBH baik dengan mengadakan zoom meeting maupun mengirim pesan Whatsapp.	Aktif
Target B12: 3. Terlaksananya proses verifikasi dan akreditasi OBH baru. 4. Terlaksananya proses reakreditasi OBH yang sudah ada.	Capaian Target: 1. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum baru untuk periode tahun 2022 – 2024 terhadap 121 organisasi di tahun 2021. 2. Proses verifikasi dan akreditasi terdiri dari tahap pendaftaran, perbaikan ketidaklengkapan dokumen verifikasi, pemeriksaan faktual/survei lapangan, rekomendasi pokjada, verasi pusat, sampai	Nilai: 100%

	<p>rekomendasi kelolosan PBH baru, yang dilakukan oleh Tim 7 bersama Kelompok Kerja Pusat (Pokjapus).</p> <p>3. Re-akreditasi juga telah dilakukan terhadap 498 OBH lama dari periode sebelumnya 2019-2021.</p> <p>4. Total OBH baru yang sudah verifikasi dan akreditasi serta OBH lama yang reakreditasi periode 2022-2024 ini adalah 619 OBH.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN sudah melibatkan YLBHI dalam Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi (Tim 7).</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Terselenggaranya evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>BPHN telah melakukan evaluasi terkait proses verifikasi dan akreditasi untuk PBH.</p> <p>Namun, nilai target capaian hanya mencapai 70% karena menurut laporan dari OMS, BPHN tidak melibatkan PBHI atau OMS lainnya dalam proses evaluasi. Data dukung yang dikumpulkan oleh BPHN juga tidak mengandung laporan terkait ko-kreasi antar BPHN dan OMS dalam proses evaluasi.</p>	Nilai: 70%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam laporan yang dikumpulkan dan menurut laporan OMS, BPHN tidak melibatkan PBHI atau OMS lainnya dalam proses evaluasi.</p>	Pasif
OMS Sektor Keadilan		
Target B06:	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS telah berpartisipasi dalam sosialisasi dengan BPHN.</p>	Nilai: 100%

Sosialisasi kegiatan outreach/penjaringan OBH di daerah.	Proses Kokreasi: OMS telah membantu BPHN dalam melakukan sosialisasi dan membagikan pesan <i>whatsapp</i> serta mengadakan zoom <i>meeting</i> .	Aktif
Target B12: 1. Keterlibatan dalam proses verifikasi dan akreditasi OBH baru. 2. Keterlibatan dalam proses reakreditasi OBH yang sudah ada.	Capaian Target: YLBHI telah terlibat dalam proses verifikasi.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN sudah melibatkan YLBHI dalam anggota Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi (Tim 7).	Aktif
Target B18: Keterlibatan dalam proses evaluasi proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.	Capaian Target: PBHI sedang melakukan penelitian terkait sebaran jumlah PBH dan kebutuhan serta kondisi masyarakat miskin. PBHI akan menyerahkan penelitian ini kepada BPHN ketika penelitian sudah selesai. Selama periode B18, PBHI tidak dilibatkan oleh BPHN dalam proses evaluasi, sehingga nilai target capaian hanya mencapai 70.	Nilai: 70%
	Proses Kokreasi: BPHN tidak melibatkan PBHI dalam melakukan proses evaluasi selama periode B18.	Pasif
Ukuran Keberhasilan 2: Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		

Target B06: 1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal. 2. Tersedianya pedoman kurikulum pelatihan paralegal.	Capaian Target: 1. Telah tersedia Permenkum HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang mengatur tentang ketentuan paralegal, hak dan kewajiban, kompetensi dan pelatihan, pemberdayaan paralegal, hingga pengawasan dan evaluasi paralegal. 2. Telah tersedia Pedoman Kurikulum Pelatihan Paralegal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal dengan menjadi narasumber dalam Rapat Jaringan Bantuan Hukum.	Aktif
Target B12: Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal yang melibatkan OMS	Capaian Target: 1. BPHN telah mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Mendorong Implementasi Kebijakan Pelatihan Paralegal Yang Mengakomodasi Stakeholders Bantuan Hukum”. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 September 2021 via platform zoom, mengundang narasumber yang berkompeten dari akademisi maupun praktisi. 2. Tanggapan peserta terhadap Permekumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal diperlukan untuk menilai efektivitas sosialisasi dan kesesuaian implementasi Permekumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal.	Nilai: 100%

	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan PBHI dalam pelaksanaan diskusi publik dalam hal pelaksanaan teknis Diskusi Publik.	Akif
Target B18: Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait paralegal yang melibatkan OMS.	Capaian Target: BPHN bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo telah melakukan Penyiapan Bahan Optimalisasi Capaian dan Kualitas Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 yang juga dihadiri oleh Perwakilan dari OBH.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan perwakilan OBH dalam kegiatan implementasi. Selain itu, BPHN juga sudah melibatkan PBHI dalam penyusunan pedoman pelatihan.	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Target B06: Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait paralegal.	Capaian Target: PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal, tapi belum terlibat dalam penyusunan draf pedoman kurikulum pelatihan paralegal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal, tapi belum terlibat dalam penyusunan draf pedoman kurikulum pelatihan paralegal.	Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Sosialisasi Peraturan Menteri Kemenkumham terkait Paralegal.	Sosialisasi telah dilakukan melalui pemaparan materi dalam kegiatan Rapat Jaringan Bantuan Hukum.	
	Proses Kokreasi: BPHN telah melibatkan PBHI dalam pelaksanaan diskusi publik dalam hal pelaksanaan teknis.	Aktif
Target B18: Terlaksananya pelatihan paralegal	Capaian Target: PBHI telah dilibatkan oleh BPHN dalam proses implementasi, khususnya dalam penyusunan pedoman pelatihan. Saat ini. PBHI juga sedang dalam proses persiapan penyelenggaraan diklat di 10 wilayah dan sudah melakukan konsultasi bersama BPHN untuk proses penyelenggaraan diklat.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PBHI telah dilibatkan dalam proses implementasi, khususnya dalam penyusunan pedoman pelatihan.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 3: Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum.		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		

<p>Target B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Tersedianya Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum. 	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkum HAM No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum sudah disusun, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi. b. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi. 2. Kemenkumham juga telah menyusun pedoman terkait standar layanan bantuan hukum yang berisikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hak dan Kewajiban pemberi Bankum; b. Standar Layanan Bankum Litigasi; c. Standar layanan Bankum Non-Litigasi; dan d. Pembinaan: 1). Asistensi; 2) Penilaian; 3) Pengaduan; dan 5) Sanksi. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum. 	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada PBH via platform Zoom. 2. Sosialisasi juga telah dilakukan terhadap beberapa OBH via zoom, yakni Yayasan Hukum Lasinrang, LBH Surya NTT, dan BKBH FH Universitas Jember. 3. Sosialisasi diberikan agar setiap OBH dapat memperoleh pemahaman yang sama dalam memberikan layanan bantuan hukum, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan layak. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p>	<p>Aktif</p>

	BPHN telah melakukan sosialisasi bersama dengan OMS , yaitu Yayasan Hukum Lasinrang, LBH Surya NTT, dan BKBH FH Universitas Jember.	
Target B18: Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: BPHN telah melakukan sosialisasi terkait Standar Layanan Bantuan Hukum kepada PBH terverifikasi dan memastikan PBH yang terverifikasi melakukan implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. Dengan itu, BPHN telah memenuhi target capaian B18.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN telah mengadakan diskusi bersama PBHI, IJRS, LBH APIK dan YLBHI terkait implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum.	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Target B06: Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait Standar Layanan Bantuan Hukum.	Capaian Target: OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.	Aktif
Target B12:	Capaian Target: OMS tidak mengumpulkan data dukung	Nilai: 0%

Sosialisasi Standar Layanan Bantuan Hukum.	Proses Kokreasi: OMS tidak mengumpulkan data dukung	Pasif
Target B18: Adopsi Standar Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: OMS Keadilan telah terlibat dalam diskusi bersama BPHN terkait implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum. Namun, nilai capaian hanya mencapai 50% karena OMS tidak melaporkan proses atau kemajuan implementasi untuk adopsi standar layanan bantuan hukum.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: BPHN telah mengadakan diskusi bersama PBHI, IJRS, LBH APIK dan YLBHI terkait implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum.	Aktif
Tindak Lanjut Menuju B24: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada B18, BPHN dan OMS Keadilan melakukan evaluasi terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum, namun proses tersebut tidak dilakukan secara kokreasi. Untuk B24, perlu ada rekomendasi yang disusun bersama-sama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum. 2. BPHN telah melakukan implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang melibatkan OBH. Untuk B24, perlu dilakukan evaluasi bersama terkait implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021. 3. BPHN telah melakukan sosialisasi bagi OBH yang terverifikasi untuk implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Pada B24, perlu dilakukan evaluasi terkait implementasi tersebut. 		

4. OMS Keadilan tidak mengumpulkan data dukung terkait terlaksananya Standar Layanan Bantuan Hukum. OMS Keadilan perlu mengumpulkan hasil pelaksanaan ini dan melakukan evaluasi terkait implementasi pada B24.

Komitmen 9

Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Korban

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: Identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan berdasarkan hasil : 1. Analisa dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan dan Bantuan Hukum oleh Pusat Analisa dan Evaluasi BPHN. 2. Urgensi Perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam rangka Akses Atas Keadilan.	Capaian Target: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melakukan identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan dengan hasil: a. adanya kesempatan bagi kelompok rentan memperjuangkan haknya dalam judicial review. b. ketimpangan jumlah PBH. c. bankum yang dinilai belum memberikan keadilan. d. pelaksanaan bankum yang masih menitikberatkan pada litigasi dan lokasi biaya. Analisa tersebut menjadi dasar pentingnya melakukan revisi UU Bankum.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: BPHN Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan kokreasi dengan LBH Apik dalam bentuk <i>Focus Group Discussion</i> dalam penyusunan.	Aktif

<p>Target B12:</p> <p>Evaluasi kebijakan bantuan hukum terkait pemberian bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan hasil evaluasi terhadap UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan temuan akar permasalahan, yakni definisi dari penerima bantuan hukum itu sendiri yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang hanya memberikan cakupan terhadap masyarakat kurang mampu atau miskin secara ekonomi. Padahal, masyarakat yang mampu secara ekonomi pun masih bisa mengalami kerentanan pada aspek lain, misalnya gender. Hal tersebut mengakibatkan perspektif gender dan keberpihakan terhadap kelompok rentan yang tidak hanya sekadar rentan ekonomi menjadi penting untuk menjadi fokus perhatian demi mewujudkan keadilan secara lebih merata. 2. Dalam laporannya, Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil merumuskan kualifikasi atas 3 hal, yaitu (1) Setiap orang yang berada dalam Proses Perkara; (2) Masyarakat mampu; dan (3) Masyarakat kurang mampu. 	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>
	<p>Proses Kokreasi</p> <p>LBH APIK telah dilibatkan dalam melakukan evaluasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan. Pelibatan LBH APIK tergambarkan dalam</p>	<p>Aktif</p>

	laporan data dukung dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM	
Target B18: Penyusunan draft kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Capaian Target: BPHN telah melakukan evaluasi kebijakan Bantuan Hukum untuk pemberian Bantuan Hukum bagi korban, terutama kelompok rentan dan perempuan. Dari hasil tersebut, telah disusun draft kebijakan bantuan hukum bagi korban kelompok rentan dan perempuan berupa kurikulum pendidikan dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: LBH APIK telah dilibatkan dalam proses diskusi dan penyusunan untuk kebijakan.	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Target B06: Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Capaian Target: Telah tersedia kajian kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: LBH Apik telah mempresentasikan kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan kepada aparaturnya penegak hukum wilayah DKI Jakarta, Pengadilan tinggi, Polda polres, Kejati/kejari, Kanwil Kemenkumham DKI dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI, tetapi belum dipresentasikan ke BPHN.	Aktif

Target B12: Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Capaian Target: LBH APIK berpartisipasi dalam penyusunan kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban, terutama kelompok rentan dan perempuan	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Proses kokreasi terlihat dalam Data Dukung BPHN, yaitu melalui pelibatan dalam perumusan terkait kebijakan bagi kelompok rentan dan perempuan.	Aktif
Target B18: Terlibat dalam pemberian masukan penyusunan langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Capaian Target: LBH APIK telah dilibatkan BPHN dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, LBH APIK dan OMS Keadilan lainnya telah menyerahkan kerangka acuan kerja untuk penyusunan kajian yang dapat menjadi masukan kebijakan kepada BPHN.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: LBH APIK telah dilibatkan BPHN dalam penyusunan langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban, terutama kelompok rentan dan perempuan.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan, dan gender.		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		

<p>Target B06:</p> <p>Penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan, dan gender yang melibatkan OMS.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah tersusun kurikulum oleh BPHN dengan memasukan perspektif korban dan sensitifitasnya dalam materi isu-isu kelompok rentan dan gender. Adapun perspektif gender yang dimasukkan dalam kurikulum ini ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Gender, minoritas, dan kelompok rentan; 2. Konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan; dan 3. Isu-isu terkait gender, minoritas, dan kelompok rentan. 	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses kokreasi antara BPHN dan OMS Sektor Keadilan telah terjadi dalam penyusunan kurikulum pelatihan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum bersama sejak 2019 hingga 2021, melalui pelibatan dalam perumusan dan pemberian masukan.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Sosialisasi kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.</p>	<p>Capaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi kurikulum kepelatihan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan dengan 3 OMS, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA). b. Asosiasi LBH Apik. c. LBH Papua Justice and Peace. 2. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan tiga hal utama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan. 	<p>Nilai: 100%</p>

	<p>b. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.</p> <p>c. Dapat menggali issue-issue terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Terlibat dalam melakukan sosialisasi kepada Aparat Penegak hukum.</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Pelatihan Tahap I peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dengan BPHN dan OBH terakreditasi di wilayah Kepulauan Riau.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>BPHN telah melibatkan PBH wilayah Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Tahap I.</p>	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
<p>Target B06:</p> <p>Terlibatnya OMS dalam penyusunan kurikulum pelatihan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS telah terlibat dalam penyusunan kurikulum dalam bentuk partisipasi perumusan dan pemberian masukan.</p>	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>

peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	Proses Kokreasi: Proses kokreasi antara BPHN dan OMS Sektor Keadilan telah terjadi dalam penyusunan kurikulum pelatihan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum bersama sejak 2019 hingga 2021, melalui pelibatan dalam perumusan dan pemberian masukan.	Aktif
Target B12: Penyusunan modul peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	Capaian Target: Proses Kokreasi antara BPHN dengan LBH APIK teridentifikasi dalam Data Dukung BPHN. Bentuk kokreasi yang dilakukan ialah sosialisasi bersama dengan BPHN.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi antara BPHN dengan LBH APIK teridentifikasi dalam Data Dukung BPHN. Bentuk kokreasi yang dilakukan ialah sosialisasi bersama dengan BPHN.	Aktif
Target B18: Pelatihan Tahap I peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan dan gender bagi pemberi bantuan hukum	Capaian Target: Berdasarkan data dukung yang dikumpulkan, OMS telah melakukan pemberdayaan hukum kepada populasi kunci dengan memberikan pemahaman terkait penyusunan kronologis dan teknik investigasi untuk pemantauan dan pelaporan kasus. Namun, target ini hanya mendapatkan nilai capaian sebesar 50% karena OMS masih belum melakukan pelatihan kepada PBH untuk pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan. Meskipun sebagian dari populasi kunci dapat masuk ke dalam lingkup kelompok rentan, pelaksanaan	Nilai: 50%

	<p>pemberdayaan hukum ini kurang sesuai dengan target yang telah ditentukan, di mana target penerima pelatihan seharusnya merupakan PBH dengan topik pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Dalam laporan yang dikumpulkan, OMS tidak memberi keterangan apakah terjadi kokreasi antar OMS dan BPHN dalam melaksanakan target capaian ini.</p>	Pasif
<p>Tindak Lanjut Menuju B24:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN telah melibatkan OMS dalam penyusunan draft kebijakan bantuan hukum bagi kelompok rentan, dan OMS akan membuat kajian pendalaman untuk memberikan masukan lebih lanjut. Di periode selanjutnya, OMS perlu menyelesaikan kajian pendalaman dan terus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, dan langkah kebijakan tersebut sudah harus tersedia oleh BPHN. 2. BPHN dan OMS Keadilan perlu melakukan pelatihan Tahap II peningkatan kapasitas dan kualitas pemberi bantuan hukum untuk kelompok rentan. 3. OMS Keadilan perlu membuat evaluasi pelatihan terkait peningkatan kapasitas dan kualitas pemberi bantuan hukum untuk kelompok rentan. 4. BPHN dan OMS Keadilan perlu bertemu kembali untuk mendiskusikan penganggaran OMS Keadilan dalam pelaksanaan pelatihan, karena OMS Keadilan telah menyebutkan kurangnya alokasi anggaran sebagai salah satu penghambat pelaksanaan pelatihan dalam periode B18. 		

Komitmen 10

Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: Terinventarisir dan teridentifikasinya materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan analisa dan kajian singkat yang hasilnya menunjukkan bahwa kasus sengketa informasi dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam salah satu jenis perkara baik litigasi dan/atau nonlitigasi, dengan catatan kasus tersebut masuk dalam ruang lingkup layanan bantuan hukum, di antaranya : (1) Litigasi (Perdata dan TUN); (2) Nonlitigasi (Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Konsultasi Hukum, Mediasi, Negosiasi, Investigasi Kasus, Pendampingan di Luar Pengadilan, Drafting Dokumen, dan Penelitian Hukum).	Nilai: N/A
	Proses Kokreasi: OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, BPHN belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.	Pasif
Target B12: Proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam	Capaian Target: 1. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN telah melakukan analisa dan kajian singkat mengenai penanganan	Nilai 100%

penanganan perkara sengketa informasi.	<p>sengketa informasi. Adapun perjenis sengketa informasi belum terakomodir dalam pilihan jenis perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum) yang merupakan aplikasi permohonan bantuan hukum, dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dari hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p> <p>2. BPHN tidak dapat melanjutkan penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya data hasil kajian dari OMS terkait.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, BPHN belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.</p>	Pasif
<p>Target B18:</p> <p>Tersedianya draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan sengketa informasi</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dibuat draft kajian "Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi"</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>OMS telah melakukan pemetaan kebutuhan dan menyerahkan hasil pemetaan kepada BPHN.</p>	Aktif
Komisi Informasi Pusat		
Ukuran Keberhasilan 1:		

Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).		
Target B06: Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).	Capaian Target: KIP telah menyusun data sengketa informasi yang sudah dimasukkan dalam Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2019 halaman 16 – 21, dengan jumlah permohonan sengketa sebanyak 2928 kasus sepanjang 2010-2019. Sedangkan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 2531 kasus sepanjang 2010-2019.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Belum ada kokreasi antara KL dan OMS. Dalam hal ini, OMS tidak memberikan data terkait bantuan hukum.	N/A
Ukuran Keberhasilan 2: Keterlibatan dalam kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		
Target B06: Terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: Komisi Informasi Pusat tidak terlibat dalam penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya hasil kajian dari OMS terkait.	Nilai: N/A
	Proses Kokreasi: OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, KIP belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.	N/A

Target B12: Terlibat dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: 1. Keterlibatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi telah dilakukan dengan menyediakan data sengketa informasi sebagaimana telah dilaporkan pada target B06 mengenai tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN). 2. KIP tidak dapat melanjutkan penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya data hasil kajian dari OMS terkait.	Nilai: N/A
	Proses Kokreasi: OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, KIP belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.	N/A
Target B18: Terlibat dalam proses penyusunan draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: KIP telah menyediakan data sengketa informasi yang ditangani KIP untuk penyusunan draft kajian.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS telah memberikan data pemetaan kebutuhan bantuan hukum untuk perkara sengketa informasi kepada K/L terkait.	Aktif

OMS Sektor Keadilan		
Ukuran Keberhasilan 1: Terlaksananya fasilitasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		
Target B06: Terlibat dalam proses inventarisasi dan Identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: OMS belum terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi kajian.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: OMS tidak terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi kajian.	Pasif
Target B12: Terlibat dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: OMS tidak membuat kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Tidak terjadi proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan OMS terkait tidak melaksanakan kajian.	Pasif
Target B18: Tersedianya draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara	Capaian Target: OMS telah mengumpulkan data dukung yang dibutuhkan dengan mengadakan FGD yang mengundang PBH dan OMS lainnya. Hasil pertemuan FGD tersebut dan hasil riset	Nilai: 100%

sengketa	lainnya diberikan kepada BPHN untuk penyusunan kajian.	
	Proses Kokreasi: OMS telah melakukan pengumpulan data dan memberikan hasil pengumpulan data dukung kepada BPHN untuk penyusunan kajian.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Terlaksananya pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN.		
Target B06: Pemetaan kebutuhan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Capaian Target: OMS belum membuat pemetaan kebutuhan penanganan perkara sengketa informasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: OMS tidak melaksanakan pemetaan kebutuhan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Pasif
Target B12: Perancangan pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN.	Capaian Target: OMS tidak melaporkan data dukung terkait rancangan pelatihan bantuan hukum.	Nilai 0%
	Proses Kokreasi: OMS tidak melakukan perancangan pelatihan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	Pasif

Target B18: Terlaksananya pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH.	Capaian Target: OMS belum dapat melaksanakan pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi, karena tidak memiliki dukungan pendanaan.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: OMS tidak melaksanakan pelatihan, sehingga tidak melibatkan BPHN dan KIP dalam target ini.	Pasif
Tindak Lanjut Menuju B24: <ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN, KIP dan OMS Keadilan perlu berkoordinasi lebih lanjut untuk menyelesaikan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi. 2. OMS Keadilan perlu melibatkan BPHN dan KIP dalam pemberian pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan sengketa informasi kepada PBH, dan menyediakan evaluasi terkait hasil pelatihan. 		

Komitmen 11

Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS – NG.		
Kementerian Sosial		
Target B06: Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial.	Capaian Target: Pengembangan integrasi DTKS dilakukan dengan pemutakhiran DTKS, yakni melalui pembaruan data agar menghindari data uang terulang, usang, dan tidak tepat sasaran. Pemutakhiran DTKS dapat terlihat pada Keputusan Mensos yang dikeluarkan setiap bulan.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Proses kokreasi telah terjadi dengan OMS terkait yakni Medialink dalam hal pemberian masukan terhadap integrasi DTKS.	Aktif
Target B12: Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK DTKS per bulan sejak April 2021 bisa didownload oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. SK DTKS berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data lengkap <i>by name by address</i> yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagai data tunggal dan padan data kependudukan yang telah digunakan dalam penyaluran bantuan sosial yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota, bank penyalur bantuan sosial atau pos penyalur bantuan 	Nilai: 100%

	<p>sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.</p> <p>b. Sebagian data yang telah digunakan dalam penyaluran bantuan sosial di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Komunitas Adat Terpencil termasuk Suku Anak Dalam.</p> <p>c. Data yang sedang dalam proses perbaikan untuk data non-penyaluran bantuan sosial.</p> <p>3. SK DTKS per November 2021 berjumlah 140.688.408 jiwa, naik 1,01% dari jumlah 139.235.327 jiwa di April 2021.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses kokreasi telah terjadi antara Kementerian Sosial dengan Media Link, tetapi hanya berbentuk koordinasi. Sementara proses kokreasi yang substansial belum terjadi.</p>	Aktif
<p>Target B18: Pengembangan Integrasi data terpadu kesejahteraan sosial</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Sosial telah melaksanakan integrasi dengan berbagai data bantuan sosial data PKH, data sembako, dll.) ke dalam DTKS. Selanjutnya Kementerian Sosial telah mengembangkan aplikasi SAGIS untuk melaksanakan verifikasi lebih lanjut terkait Daftar Penerima Manfaat yang ada dalam DTKS untuk dipastikan kelayakannya terdaftar dalam DTKS.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kokreasi telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan Media Link terkait pengembangan aplikasi DTKS dan SAGIS oleh Kemensos, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kajian oleh Media Link.</p>	Aktif

Media Link		
Target B06: Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS – NG.	Capaian Target: Media Link telah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Media Link sudah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG sebagai OMS mitra, dengan rekomendasi: <ol style="list-style-type: none"> Melihat perkembangan saat ini, maka proses pemadanan yang belum dilakukan sampai 100% harus segera dituntaskan. Integrasi dengan seluruh program akan menjadi kemajuan penting pada perwujudan akuntabilitas seluruh program-program kesejahteraan sosial pemerintah. Kemensos perlu mengembangkan mekanisme verifikasi dan validasi yang inklusif bagi PPKS (Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial) dengan cara mengembangkan mekanisme khusus (terpisah dari mekanisme regular) untuk merespon kebutuhan kelompok rentan dan termarginalkan dengan mengoptimalkan peran CSO melalui swakelola Tipe 3 maupun mengoptimalkan aplikasi Cek Bansos untuk mekanisme verifikasi dan validasi online. 	Aktif
Target B12: Tersedianya kajian dan masukan terkait	Capaian Target: Media Link telah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG.	Nilai: 100%

pengembangan SIKS – NG.	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Media Link sudah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG sebagai OMS mitra, dengan rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melihat perkembangan saat ini, maka proses pemadanan yang belum dilakukan sampai 100% harus segera dituntaskan. Integrasi dengan seluruh program akan menjadi kemajuan penting pada perwujudan akuntabilitas seluruh program-program kesejahteraan sosial pemerintah. Kemensos perlu mengembangkan mekanisme verifikasi dan validasi yang inklusif bagi PPKS (Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial) dengan cara mengembangkan mekanisme khusus (terpisah dari mekanisme regular) untuk merespon kebutuhan kelompok rentan dan termarginalkan dengan mengoptimalkan peran CSO melalui swakelola Tipe 3 maupun mengoptimalkan aplikasi Cek Bansos untuk mekanisme verifikasi dan validasi online. 	Aktif
<p>Target B18: Tersedianya Kajian dan Masukan terkait Pengembangan SIKS-NG</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Media Link telah menyusun kajian serta rekomendasi kepada Kementerian Sosial terkait pengembangan aplikasi SIKS-NG. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa, SIKS-NG telah dikembangkan selaras dengan prinsip Keterbukaan Pemerintah dan masukan dari Media Link telah diakomodir oleh Kemensos.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Proses Kokreasi telah dilaksanakan dengan baik melalui pemberian rekomendasi dan rapat koordinasi Media Link dengan Kemensos</p>	Aktif

Ukuran Keberhasilan 2: Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap feedback masyarakat.		
Kementerian Sosial		
Target B06: Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.	Capaian Target: Kemensos telah mengembangkan data penerima program kesejahteraan sosial untuk diakses oleh Penerima Manfaat melalui laman: https://cekbansos.kemensos.go.id . Nantinya Penerima Manfaat dapat mengecek apakah mereka menerima bantuan sosial seperti PKH, BST, dan BNPT.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kemensos belum melibatkan unsur non-pemerintah dalam proses ini.	Pasif
Target B12: Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan inklusifitas dan akuntabilitas dari masyarakat serta meningkatkan keterbukaan atau transparansi penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, Kementerian Sosial mengembangkan fitur usul sanggah pada aplikasi cek bansos dalam bentuk mobile. 2. Aplikasi ini bisa di download di playstore dengan nama Aplikasi Cek Bansos. Usul Sanggah merupakan salah satu menu yang tersedia pada aplikasi cek bansos yang bisa diakses dengan menggunakan user id yang telah diverifikasi dan diaktivasi oleh admin Kementerian Sosial. 	Nilai: 100%

	Proses Kokreasi: Belum terjadi Proses Kokreasi antara Kementerian Sosial dengan OMS.	Pasif
Target B18: Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik	Capaian Target: Kementerian Sosial telah mengembangkan aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memberikan usulan maupun tanggapan terkait dengan kelayakan penerimaan bantuan sosial. Aplikasi tersebut dapat di download bagi pengguna android.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kokreasi telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan Media Link terkait pengembangan aplikasi DTKS dan SAGIS oleh Kemensos, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kajian oleh Media Link.	Aktif
Media Link		
Target B06: Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan.	Capaian Target: Media Link belum melakukan sosialisasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Media Link belum melakukan sosialisasi.	Pasif
Target B12: Sosialisasi untuk menggerakkan	Capaian Target: Media Link telah melaksanakan sosialisasi dengan materi "Strategi Penanggulangan	Nilai: 100%

masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan.	Kemiskinan Terintegrasi melalui Brebes Data Tunggal.”	
	Proses Kokreasi: Sosialisasi dilakukan pada 17 Kepala Desa dari 17 Kecamatan dan 5 Kelurahan di Kabupaten Brebes dengan materi : ‘Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi melalui Brebes Data Tunggal” Pada sosialisasi ini, Media Link mengajak Kepala Desa agar masyarakat melakukan pemeriksaan data Bantuan Sosial masing-masing.	Aktif
Target B18: Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan	Capaian Administratif: Media Link belum melaksanakan sosialisasi terkait dengan DTKS. Sosialisasi baru akan dilaksanakan pertengahan Juli 2022	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Belum melaksanakan kokreasi	Pasif
Tindak Lanjut Menuju B24: 1. Media Link perlu segera melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan. 2. Kementerian Sosial dapat segera menindaklanjuti masukan dari kajian Media Link		

Komitmen 12

Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa

Ukuran Keberhasilan 1: Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan		
Kementerian Desa PDTT		
Target B06: Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para pemangku kepentingan	Capaian Target: Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa telah dilakukan kepada para OMS agar OMS dapat mempelajari kebijakan ini.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) telah melibatkan Seknas FITRA dalam melakukan Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa. 2. Kemendesa PDTT juga telah berkoordinasi dengan WVI untuk membagikan konsep Akuntabilitas Sosial. 	Aktif

Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD) perihal Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa. 2. Terlaksananya pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk KPMD) perihal akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersusun rencana pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD) perihal Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa. 2. Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa menggarisbawahi strategi penerapan akuntabilitas sosial di desa yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan partisipasi warga desa, dengan melakukan kaderisasi desa, pengembangan kapasitas literasi, pengembangan kapasitas warga desa; b. Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, dengan cara mendorong keterbukaan informasi, penguatan musyawarah desa, penguatan kepemimpinan desa, serta penyusunan produk hukum yang partisipatif; dan c. Penguatan tata kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial, dengan cara pendataan Sistem Informasi Desa (SID), visi kolektif warga desa, dan perencanaan pembangunan dan anggaran desa untuk SDGs Desa. 4. Masyarakat desa (termasuk KPMD) telah mempelajari akuntabilitas sosial ketika menghadiri sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial. 	

	<p>Proses Kokreasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa bersama dengan Seknas FITRA telah menyusun Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa sebagai panduan dalam memberikan pembelajaran terkait akuntabilitas sosial di desa. 2. Dalam proses penyusunan dan sosialisasi, Kementerian Desa telah aktif melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan OMS mitra OGI seperti WVI dan TII. 3. Dengan pelibatan aktif ini, diharapkan daerah binaan OMS akan mendapatkan pembelajaran terkait akuntabilitas sosial berdasarkan panduan yang sama. 	Aktif
<p>Target B18: Terimplementasikannya model akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa di lokasi percontohan</p>	<p>Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melaksanakan implementasi model akuntabilitas di dua Desa dan telah melaksanakan kokreasi dengan Wahana Visi Indonesia selaku mitra OMS dalam komitmen ini. Model akuntabilitas yang dikembangkan adalah mekanisme <i>scorecard</i> untuk memberikan penilaian terhadap program yang dijalankan. Kedepannya, perlu dilaksanakan implementasi model akuntabilitas di desa lainnya sesuai dengan target capaian. WVI dan OMS lainnya perlu dilibatkan dalam pelaksanaan model akuntabilitas sosial</p>	Nilai: 100%

	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi telah dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT dengan WVI dalam bentuk kunjungan ke Kupang, selaku desa pelaksanaan akuntabilitas desa WVI. Dalam kunjungan juga akan menyusun Buku Saku terkait Kartu Penilaian Layanan Perlindungan Anak dalam Musyawarah Desa	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memahami konsep implementasi akuntabilitas sosial.		
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06: Terlaksananya pertemuan multi-pihak antara Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil terkait implementasi akuntabilitas sosial.	Capaian Target: Pertemuan multi-pihak belum terselenggara dikarenakan akibat refocusing anggaran, sehingga target ini tidak dapat tercapai.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: OMS juga tidak dapat mengikuti pertemuan multipihak karena pertemuan tidak terlaksana.	Pasif

Target B12: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan paparan terkait program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang merupakan payung program pelaksanaan akuntabilitas sosial di desa di agenda sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT. 2. Paparan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dan OMS yang hadir dalam Agenda Penguatan P3PD, yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT. 	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: OMS telah hadir untuk mempelajari akuntabilitas sosial dalam agenda sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT.	Aktif
Target B18: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD	Capaian Target: Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD terkait pemahaman konsep implementasi akuntabilitas sosial telah dilaksanakan melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Namun, terkait dengan pelatihan kepada BPD belum	Nilai: 75%
	Proses Kokreasi: Kementerian Dalam Negeri belum melaksanakan Kokreasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pelatihan Akuntabilitas Sosial pada Aparat Desa dan BPD	Pasif

OMS		
Ukuran Keberhasilan 1: Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa.		
Target B06: 1. Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Terlaksananya pertemuan multipihak antara Kementerian/Lem baga dan OMS terkait implementasi akuntabilitas social.	Capaian Target: OMS telah berpartisipasi dalam sosialisasi serta pertemuan multipihak yang ada. Proses Kokreasi: OMS (Fitra, TII dan WVI) telah melakukan sosialisasi kebijakan akuntabilitas dan berkoordinasi dengan Kemendesa PDTT.	Nilai: 100% Aktif
Target B12: 1. Tersusunnya panduan operasional terkait Akuntabilitas Sosial bagi masyarakat desa dan pemerintahan	Capaian Target: WVI merupakan OMS yang aktif terlibat dan hadir dalam bimtek yang diadakan oleh Kementerian Desa PDTT. Kerangka operasional yang telah dikumpulkan adalah manifestasi dari hasil pembelajaran dari Kementerian Desa dan pengalaman WVI di desa dampingan.	Nilai: 100%

desa untuk meningkatkan pelayanan di desa. 2. Asistensi pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk KPMD) dan pemerintahan desa perihal akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa.	Proses Kokreasi: WVI merupakan OMS yang aktif terlibat dan hadir dalam bimtek yang diadakan oleh Kementerian Desa PDTT. Kerangka operasional yang telah dikumpulkan adalah manifestasi dari hasil pembelajaran dari Kementerian Desa dan pengalaman WVI di desa dampingan.	Aktif
Target B18: Asistensi implementasi model akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa di lokasi percontohan	Capaian Target: WVI telah melaksanakan implementasi model akuntabilitas sosial di beberapa lokasi, termasuk asistensi Kementerian Desa PDTT di wilayah Kupang. Kedepannya perlu berkoordinasi dengan Kemendesa agar dapat terus terlibat dalam pelaksanaan implementasi model akuntabilitas sosial di Desa percontohan lainnya yang saat ini dalam tahap pengadaan.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi antara OMS dengan Kemendesa PDTT dengan pelaksanaan kunjungan dari Kemendesa PDTT menuju desa dampingan WVI.	Aktif
Tindak Lanjut Menuju B24: Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Desa PDTT - serta OMS perlu dikuatkan untuk menjamin pelaksanaan Akuntabilitas Sosial di Desa dapat semakin maksimal.		

Komitmen 13

Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

Ukuran Keberhasilan 1:

Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data) dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU

Target B06: Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Capaian Target: KPU tidak mengumpulkan data dukung hingga akhir masa verifikasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Koordinasi antara KPU dan Perludem masih terhambat karena belum ada PoC KPU untuk RAN OGI.	Pasif
Target B12: Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Capaian Target: 1. Telah terdapat sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format Open Data KPU. 2. KPU telah melaksanakan Launching Open Data di Ruang rapat Kantor KPU RI pada tanggal 29 September 2021. 3. KPU sudah mulai responsif dalam komunikasi terkait progres. Sekretariat OGI mengupayakan grup bersama KPU dengan Perludem.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi:	Aktif

	KPU telah menerima audiensi dari Perludem mengenai peningkatan <i>platform</i> Open Data KPU.	
Target B18: Integrasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu dan tersedianya data pemilu dalam format data terbuka (open data)	Capaian Target: KPU telah melaksanakan integrasi informasi penyelenggaraan Pemilu ke dalam portal www.opendata.kpu.go.id . Dalam portal telah tersedia 9 Topik yang terdiri atas 144 Dataset serta 332 Filedata yang dapat diakses oleh publik dan telah disajikan dalam format <i>Open Data</i> .	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam rapat koordinasi telah diinformasikan oleh Perludem terkait hasil kajiannya serta informasi data yang perlu disajikan dalam portal Open Data KPU.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel.		
KPU		
Target B06: Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Capaian Target: KPU tidak mengumpulkan data dukung hingga akhir masa verifikasi.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Koordinasi antara KPU dan Perludem masih terhambat karena belum ada PoC KPU untuk RAN OGI.	Pasif

Target B12: Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	Capaian Target: KPU telah melaksanakan uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di TPS dengan tujuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di TPS oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 2. Melakukan sosialisasi kepada petugas KPPS serta jajaran satker KPU daerah dan masyarakat terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). 3. Mengukur berbagai macam bentuk penulisan dari beberapa petugas KPPS dalam formulir Plano agar dapat disesuaikan dan diukur hasil akurasi pembacaan sistem terhadap tulisan Uji coba Aplikasi Sirekap dilakukan di beberapa daerah, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor KPU. b. Kota Depok. c. Bandung. d. Kota Magelang. e. Seluruh wilayah yg menyelenggarakan Pilkada 2020 (menjelang hari H, sesuai surat No 669). KPU sudah responsif dalam komunikasi terkait progres, walaupun masih ada silo dalam departemen. Sekretariat OGI mengupayakan grup bersama KPU dengan Perludem. Namun, yang melakukan pelaporan dari KPU adalah biro lainnya.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi:	Aktif

	KPU telah menerima audiensi dari Perludem mengenai peningkatan rekapitulasi elektronik.	
Target B18: Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah	Capaian Target: KPU telah melaksanakan uji coba terkait Sistem Rekapitulasi (SIREKAP) pada 30 Maret 2022. Namun, uji coba tersebut belum sampai dengan bagaimana menyajikan/menampilkan hasil rekapitulasi dalam bentuk data yang terbuka.	Nilai: 75%
	Proses Kokreasi: Rapat Koordinasi untuk pembahasan target capaian telah difasilitasi oleh Sekretariat OGI. Namun, tindak lanjut dari rapat belum dilaksanakan, yaitu dengan melibatkan Perludem dalam proses uji coba dalam SIREKAP sampai dengan bentuk penyajiannya.	Semi-Aktif
PERLUDEM		
Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi informasi penyelenggaraan pemilu dalam format data terbuka.		
Target B06: Tersedianya kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia.	Capaian Target: Perludem telah membuat kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia dan sudah disampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu DPR RI.	Nilai: 100%

	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kajian belum disampaikan ke KPU. 2. Highlight Kajian: Unsur ekosistem <i>civic tech</i> yang berhasil dengan rating hijau diantaranya kepemimpinan dan komitmen politik, keterlibatan dan kapabilitas warga, dan dukungan anggaran. 	Aktif
Target B12: Tersedianya kajian tentang ketersediaan data pemilu dan rekomendasi strategi digitalisasi menjadi format data terbuka.	Capaian Target: Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekosistem <i>civic tech</i> dan data pemilu terbuka di Indonesia cukup baik dengan masyarakat sipil dan teknologi pemilu warga yang ada dan komitmen penyelenggara pemilu untuk menyediakan data pemilu terbuka.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi KPU dan Perludem belum optimal sehingga pelaksanaan Capaian Target dilakukan masing-masing tanpa adanya koordinasi. Contact person dari KPU bukan dari divisi yang secara langsung mengimplementasi renaksi. Sehingga dalam proses pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi, koordinasi antar lembaga (sekretariat OGI, KPU, dan Perludem) belum optimal. 	Semi Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Terselenggarakannya kajian akademik terkait uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel.		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Tersedianya rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu.	Perludem telah menyusun rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu.	
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan telah disampaikan ke Baleg DPR RI dan Panja RUU Pemilu DPR RI namun belum disampaikan ke KPU. 2. Highlight Kajian: Unsur ekosistem <i>civic tech</i> yang berhasil dengan rating hijau diantaranya kepemimpinan dan komitmen politik, keterlibatan dan kapabilitas warga, dan dukungan anggaran. 	Aktif
Target B12: Tersedianya kajian tentang kesiapan pengelolaan data hasil pemilu melalui sistem rekapitulasi elektronik.	Capaian Target: Telah tersedia kajian tentang kesiapan pengelolaan data hasil pemilu melalui sistem rekapitulasi elektronik.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara umum, sebagian besar data kunci pemilu sudah terbuka dan tersedia secara online. Namun, data-data tersebut belum bisa secara penuh disebut sebagai open data. Dalam kajiannya, Perludem menuliskan prinsip-prinsip open data. 2. Komunikasi KPU dan Perludem belum optimal sehingga pelaksanaan Capaian Target dilakukan masing-masing tanpa adanya koordinasi. <i>Contact person</i> dari KPU bukan dari divisi yang secara langsung mengimplementasi renaksi. Sehingga dalam proses pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi, koordinasi antarlembaga (sekretariat OGI, KPU, dan Perludem) belum optimal. 	Semi Aktif

Target B18: Terselenggarakannya pemantauan uji coba rekapitulasi elektronik di beberapa daerah	Capaian Target: Koordinasi dalam rangka pencapaian target telah dilakukan antara Perludem - KPU dengan difasilitasi Sekretariat OGI. Namun, tindak lanjut dari pertemuan tersebut belum dilakukan oleh KPU maupun Perludem.	Nilai: 50%
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi baru dilaksanakan sebatas rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Sekretariat OGI. Namun, tindak lanjut dalam rangka pencapaian target belum dilaksanakan.	Semi Aktif
Tindak Lanjut Menuju B24: UK 1 <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menindaklanjuti hasil kajian Perludem terkait informasi yang telah ditetapkan dalam portal Open Data KPU. 2. KPU dan Perludem segera menetapkan komponen data yang menjadi prioritas untuk disajikan dalam portal Open Data KPU. UK 2 <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU perlu memastikan uji coba SIREKAP dilakukan sampai dengan tahapan penyajian informasi hasil SIREKAP di dalam halaman yang telah ditentukan. 2. KPU dan Perludem diharapkan menyepakati bentuk-bentuk Kokreasi yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Target B24. 		

Komitmen 14

Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data

Ukuran Keberhasilan 1: Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data yang dapat diakses oleh publik.		
Kementerian Kesehatan		
Target B06: 1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.	Capaian Target: 1. Kemenkes telah melakukan uji coba sistem M-Health di 25 Puskesmas wilayah Jabodetabek. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan juga telah terlaksana. Perbaruan data tersebut dapat dilihat dalam surat Kepmenkes No. 4720 Tahun 2021 terkait Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terintegrasi.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam melakukan uji coba ini, Kemenkes belum melibatkan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).	Pasif
Target B12: 1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.	Capaian Target: 1. Sosialisasi dan implementasi aplikasi MHealth: Pendampingan Piloting Implementasi Aplikasi MHealth untuk seluruh puskesmas di 10 Kabupaten/Kota terpilih: Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kota Malang.	Nilai: 100%

	<p>2. Kegiatan sosialisasi berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Paparan kondisi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS - PK) Kabupaten/Kota. Paparan fitur baru aplikasi Keluarga Sehat dan aplikasi MHealth. Pendampingan penggunaan aplikasi MHealth Nakes, Beneficer, dan Intervensi Manajer. <p>3. Highlight materi sosialisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi PIS - PK dan Kekurangan PIS - PK: <ul style="list-style-type: none"> Tenaga Kesehatan: tidak bisa memantau kondisi keluarga yang telah disurvei Masyarakat: tidak dapat mengetahui status keluarganya dan belum bisa mendapatkan informasi Kesehatan dari faskes terdekat MHealth: <ul style="list-style-type: none"> mHealth merupakan sebuah layanan yang melakukan integrasi data individu dan keluarga dengan menggunakan PIS – PK sebagai basis data informasi (Satu Data Kesehatan) mHealth bertujuan meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dan nakes dalam peningkatan kualitas Kesehatan Indonesia Menjadi salah satu fasilitas untuk melakukan koordinasi antara masyarakat dan nakes khususnya dalam implementasi program kesehatan 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> · Tersedia MHealth bagi Nakes, Beneficer, dan Intervensi Manajer. <p>4. Pengembangan MHealth:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sistem aplikasi mHealth Nakes (web dan mobile). b. Pengembangan mobile Health Beneficer. c. Pengembangan integrasi data dengan aplikasi keluarga sehat (PIS - PK). d. Pengembangan integrasi dengan aplikasi -aplikasi lain terkait Kesehatan. <p>5. Hasil pemetaan dan perbaruan data fasilitas Kesehatan:</p> <p>Data pendukung terkait target pemetaan dan perbaruan data faskes dapat diunduh melalui Link https://link.kemkes.go.id/KMKDATAPUSKESMASDES20</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Telah terjadi dua kali rapat koordinasi antara Kemenkes dan INFID yang diinisiasi oleh INFID dan Sekretariat Nasional OGI.</p>	Aktif
<p>Target B18: Terintegrasinya data terkait Pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi ke dalam aplikasi yang dapat diakses oleh publik</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Kesehatan, melalui Digital Transformation Officer (DTO) akan melaksanakan integrasi seluruh aplikasi Kementerian Kesehatan, seperti NAR, KOMDAT KAI, EPPGBM, SIRS, Health Quarantine, SILACAK, SITB, SIHA, dll. Integrasi akan dilakukan ke dalam Indonesia Health Services (IHS) yang akan dilaunching pada bulan Juli.</p>	Nilai: 70%
	<p>Proses Kokreasi:</p>	Pasif

	Proses Kokreasi dengan INFID belum tergambarkan dalam laporan. Belum terdapat kegiatan lainnya yang juga melibatkan INFID atau unsur masyarakat lainnya.	
INFID		
Ukuran Keberhasilan 1: Sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik.		
Target B06: Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.	Capaian Target: INFID belum melakukan sosialisasi MHealth karena MHealth masih dalam tahap pengembangan.	Nilai: N/A
	Proses Kokreasi: INFID telah memberikan masukan tambahan terkait pengembangan sistem MHealth misalnya dengan menambah fitur untuk melayani kebutuhan seksual dan reproduksi. Masukan ini dapat digunakan Kemenkes untuk mengembangkan aplikasi MHealth ke depannya.	
Target B12: Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari	Capaian Target: INFID belum melakukan sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas Kesehatan dikarenakan MHealth masih dalam proses pengembangan.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: INFID telah berkoordinasi dengan Kemenkes dan Seknas OGI terkait:	Aktif

Kementerian Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi untuk memetakan inisiatif dan mendorong pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang mudah diakses oleh publik, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. 2. Saat ini, MHealth masih dalam tahap pengembangan sehingga beberapa diskusi menghasilkan beberapa tindak lanjut diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Para pihak sepakat untuk mengembangkan fitur demand side dalam MHealth dan apabila diperlukan melakukan diskusi terfokus agar lebih responsif kebutuhan kelompok rentan. b. Memastikan dan mengintegrasikan aplikasi yang akan didorong karena ada beberapa fitur mengenai kesehatan ibu dan anak di aplikasi yang berbeda yaitu peduli lindungi, telemedicine, MHealth, dan MKia. 3. Strategi percepatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rapat koordinasi pada Bulan Januari 2022 untuk mengetahui perkembangan sistem MHealth dan potensi integrasi aplikasi mengenai kesehatan ibu dan anak yang sudah dikembangkan. b. Melakukan Webinar/Podcast/konten sosial media ataupun webinar mengenai MHealth/aplikasi terkait dan relevansinya dalam mendorong kesehatan seksual dan reproduksi yang lebih baik di masa pandemik. 	
Target B18: Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan	Capaian Target: INFID telah mengirimkan <i>Terms of Reference</i> (TOR) terkait dengan kegiatan sosialisasi, serta mengajukan permohonan narasumber dari Kementerian Kesehatan. Namun, Kementerian	Nilai: 70%

reproduksi di fasilitasi kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan	Kesehatan belum menanggapi terkait dengan permohonan hal tersebut.	
	Proses Kokreasi: Proses Kokreasi telah diinisiasi oleh INFID, tetapi tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan terkait dengan peluang Kokreasi tersebut belum terlaksana.	Semi Aktif
Tindak Lanjut Menuju B24: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kesehatan perlu menetapkan Direktorat Teknis yang akan mengerjakan terkait dengan aksi ini. 2. Perlu dilaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian Kesehatan - INFID untuk memperkuat bentuk Kokreasi serta menerima masukan dari INFID terhadap aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. 3. Penyelarasan Target Capaian Komitmen antara Kementerian Kesehatan dengan INFID, dikarenakan adanya kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan 		

Komitmen 15

Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerah (dalam APBD) yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.		
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06: Terlaksananya pengembangan portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19.	Capaian Target: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri telah memiliki portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang dapat diakses publik di https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2020. 2. Pengembangan portal informasi dilakukan dengan menambahkan submenu yang khusus menyajikan data anggaran penanganan COVID-19 dalam situs web Kementerian Dalam Negeri. 	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Dalam pelaksanaan UK Kemendagri dan UK Kemenkeu, tidak terjadi proses ko-kreasi dikarenakan tidak adanya partisipasi dari Seknas Fitra selaku OMS mitra dalam memberikan masukan terkait data apa saja yang termasuk dalam portal.	Pasif
Target B12: Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi	Capaian Target: Telah tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 (manual). Dapat diakses melalui link berikut:	Nilai: 100%

<p>COVID19 tahun 2020 (manual).</p>	<p>https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2021</p> <p>Struktur informasi yang disediakan, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi dan realisasi pendanaan penanganan covid-19 di daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) bulan Oktober 2020. c. Alokasi dan realisasi pendanaan penanganan covid-19 di daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) bulan November 2020. d. Hasil November 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Provinsi: dari alokasi anggaran sebesar 36,83 T, terserap sebesar 69,80% • Tingkat Kabupaten/Kota: dari alikasi anggaran sebesar 44,30 T, terserap sebesar 50,29% 2. Tahun 2021: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendanaan penanganan covid-19 dalam APBD Provinsi. b. Pendanaan penanganan covid-19 dalam APBD Kabupaten/Kota. c. Dukungan vaksinasi dalam APBD Provinsi. d. Dukungan vaksinasi dalam APBD Kabupaten/Kota. e. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemik covid-19 APBD Provinsi. f. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemik covid-19 APBD Kabupaten/Kota. g. Hasil per Juni 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Rata rata realisasi anggaran penanganan pandemik Covid 19 di Provinsi adalah 6,37%, dengan realisasi tertinggi pada 	
-------------------------------------	---	--

	<p>Provinsi Kalimantan Timur sebesar 56,68%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata rata realisasi anggaran penanganan pandemik Covid 19 di Kabupaten/Kota adalah 10,15%, dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 47,36% 	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kementerian Dalam Negeri belum melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pengembangan informasi realisasi anggaran Covid-19 di daerah.</p>	Pasif
<p>Target B18: Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 melalui portal yang telah dikembangkan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan data rekapitulasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Kedepanya Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi dengan OMS mitra terkait bentuk penyajian agar data dapat sesuai dengan standar dan dapat dibagipakaikan oleh publik.</p>	Pasif
<p>Ukuran Keberhasilan 1:</p> <p>UK 1:</p> <p>Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat pusat yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.</p>		
<p>Kementerian Keuangan</p>		

Target B06: Terlaksananya pengembangan portal informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19.	Capaian Target: Kementerian Keuangan telah memiliki portal informasi yang berisi data ringkasan umum APBN 2020-2021. Namun, capaian administratif hanya mencapai 70 persen dikarenakan belum ada informasi terkait tampilan data yang spesifik mengenai realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di website Kemenkeu. Sejauh ini rapat koordinasi masih dilakukan untuk pengembangan dan penyediaan raw data.	Nilai: 70%
	Proses Kokreasi: Kementerian Keuangan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Seknas Fitra untuk mengembangkan portal anggaran COVID-19.	Aktif
Target B12: Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 melalui portal yang telah dikembangkan.	Capaian Target: 1. Data terkait realisasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dapat diakses pada laman https://pen.kemenkeu.go.id/ , dengan struktur informasi: a. Realisasi PEN sementara (progress penyerapan) periode Desember 2021, salah satunya sektor kesehatan b. dengan hasil data per November 2021, untuk sektor Kesehatan terserap 76% 2. Kementerian Keuangan sedang melakukan pengintegrasian data khususnya terkait anggaran dan alokasi PEN di website PC-PEN (https://pen.kemenkeu.go.id/) melalui koordinasi internal.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi:	Aktif

	Dikarenakan pengintegrasian data bersifat teknis, proses ini tidak melibatkan pihak OMS. Diharapkan kedepannya dapat dilakukan pembahasan terkait kedalaman data yang akan disajikan di portal yang telah terintegrasi.	
Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)		
Ukuran Keberhasilan 1: Terlaksananya kolaborasi pengembangan portal informasi realisasi anggaran pandemi COVID-19 yang komprehensif dan telah diaudit.		
Target B06: Terlaksananya kajian untuk memberi masukan terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19.	Capaian Target: SEKNAS FITRA sudah menyampaikan kajian terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19 kepada Kementeerian/Lembaga (K/L) mitra. Terdapat sebuah kajian <i>desk study</i> yang dilaksanakan oleh koalisi OMS yakni Seknas FITRA, TII, IBC, ICW, dan AIPJ2 yang bertajuk "Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya".	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi Hasil dari kajian tersebut adalah untuk pemerintah menaruh fokus besar tidak hanya pada penambahan anggaran penanganan COVID-19 namun juga pada tingkat penyerapannya. Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan adanya dokumentasi dan publikasi yang aktual mengenai anggaran penanganan COVID-19 agar potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah.	Aktif

Target B12: Terlaksananya FGD terkait pengembangan sistem informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID- 19 tahun 2020.	Capaian Target: Seknas FITRA telah melaksanakan webinar pada bulan Juni 2021, serta audiensi dengan Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2021.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Diskusi atau FGD berisikan masukan terkait perbaikan tampilan <i>dashboard</i> website PC-PEN serta penyajian data per minggu.	Aktif
Target B18: Sosialisasi Sistem Informasi Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 agar dapat digunakan oleh masyarakat luas	Capaian Target: Tidak melaporkan Target Capaian	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: Tidak melaporkan Target Capaian	Pasif
Tindak Lanjut Menuju B24: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seknas FITRA perlu lebih menggalakkan sosialisasi terkait portal informasi anggaran yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Keuangan diharapkan dapat segera memperbaharui informasi anggaran yang tersedia di dalam portal PEN Kementerian Keuangan. 		

Komitmen 16

Pelibatan Masyarakat Sipil Dalam Pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi) Untuk Mendorong Efektivitas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

Ukuran Keberhasilan 1:		
Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU KKR.		
Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan RUU KKR.	Capaian Target: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melibatkan masyarakat sipil dalam beberapa kegiatan sejak tahun 2020, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan substansi RUU KKR, tetapi ELSAM (unsur masyarakat) tidak dapat hadir. b. Rapat grand design penanganan peristiwa pelanggaran HAM, unsur masyarakat yang hadir adalah Profesor Harkristuti Harkrisnowo. c. Rapat grand design penanganan peristiwa pelanggaran HAM, unsur masyarakat yang hadir adalah Professor Jimly Asshiddiqie. d. Perumusan kebijakan penanganan peristiwa HAM berat, yang menjadi unsur masyarakat adalah Professor Asvi Warman Adam. Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan audiensi bersama KONTRAS dan korban peristiwa pelanggaran HAM berat untuk membahas RUU KKR serta penanganan dari peristiwa HAM berat. 	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kementerian Hukum dan HAM telah mengundang unsur non-pemerintah (OMS dan	Aktif

	akademisi) dalam bentuk FGD untuk menjaring pendapat terkait perumusan RUU KKR.	
Target B12: Tersedianya naskah akademik dan RUU KKR yang sudah disampaikan kepada Presiden dan dapat diakses publik.	Capaian Target: Direktorat Jenderal HAM telah menyusun instrumen HAM berupa Kajian Substansi Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) bersama IKOHI untuk menjawab permasalahan yang ada serta sebagai upaya konkret Pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Sebagai bukti nyata upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat ini, Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 Oktober 2021 telah mengirimkan permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RUU KKR kepada Presiden, yang diharapkan akan menjadi langkah upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial dalam bentuk upaya pemulihan dan rekonsiliasi untuk kepentingan para korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kementerian Hukum dan HAM telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yaitu Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI).	Aktif
OMS Sektor Keadilan		
Ukuran Keberhasilan 1: Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan RUU KKR.		

Target B06: Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik, dan RUU KKR.	Capaian Target: Dirjen HAM belum melibatkan OMS Sektor Keadilan yang tergabung di RAN OGI.	Nilai: N/A
	Proses Kokreasi: PBHI menyampaikan masukan terkait RUU KKR di forum diskusi publik, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong adanya dukungan penegakan hukum. b. Mendorong lahirnya RUU KKR dengan proses pembahasan yang transparan dan pelibatan masyarakat yang aktif. c. Mendukung adanya bantuan lain selain LPSK (Bantuan Medis, Psikis, Psikososial, dll.) bagi korban pelanggaran HAM. 	N/A
Target B12: Tersedianya naskah akademik dan RUU KKR yang sudah disampaikan kepada Presiden dan dapat diakses publik.	Capaian Target: OMS Sektor Keadilan tidak mengumpulkan data dukung untuk target semester dua. Selain itu, keterlibatan OMS Sektor Keadilan tidak dapat tergambarkan dalam Data Dukung Kementerian Hukum dan HAM.	Nilai: 0%
	Proses Kokreasi: OMS Sektor Keadilan tidak mengumpulkan data dukung untuk target semester dua. Selain itu, OMS Sektor Keadilan tidak dilibatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.	N/A

Tindak Lanjut:

1. Diperlukan penguatan komitmen dan kesepakatan bersama terkait proses koreksi Kemenkumham dan OMS Sektor Keadilan.
2. Mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan RUU KKR di Kementerian Hukum dan HAM.

Komitmen 17

Keterbukaan Data Beneficial Ownership (BO)

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.		
Stranas PK		
Target B06: Adanya sosialisasi, termasuk publikasi, atas kewajiban penyampaian informasi data BO Korporasi.	Capaian Target: Jumlah korporasi aktif sampai B06 2.262.080 sementara yg mendeklarasi BO 478.022 (21,13%).	Nilai: 21%
	Proses Kokreasi: Melibatkan Publish What You Pay (PWYP) dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif
Target B12: 1. Adanya kriteria mitigasi resiko dan peta korporasi berdasarkan tingkat resiko terjadinya Tipikor, TPPU, TPPT, Pidana Perpajakan dan kerusakan SDA. 2. Adanya input dari K/L pelaksana	Capaian Target: 1. Berdasarkan data KemenkumHAM, korporasi yang telah mendeklarasi BO adalah 478.022 (21,13%) atau bertambah sebesar 1,99% dari periode B03, 539.622 (23,12%). 2. Salah satu kendala rendahnya penambahan ini karena belum ada satupun sistem basis data yang dikembangkan K/L yang telah terintegrasikan dengan sistem basis data di KemenkumHAM.	Nilai: 23%

atas kriteria mitigasi resiko dan peta korporasi berdasarkan tingkat resiko terjadinya Tipikor, TPPU, TPPT, Pidana Perpajakan dan kerusakan SDA.	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif
Tarbet B18: 1. Adanya struktur data BO, termasuk mekanisme integrasi yang akan digunakan 2. Adanya sistem basis data BO yang terintegrasi 3. Adanya fitur pelacakan relasi BO pada AHU Online	Capaian Adminsitratif: Berdasarkan data KemenkumHAM, korporasi yang telah mendeklarasi BO adalah 617.851 (26,33%) atau bertambah sebesar 3,21% dari periode B12, 539.622 (23,12%).	Nilai: 26%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat.		
Stranas PK		
Target B06: Adanya pemetaan dan penetapan	Capaian Target: Jumlah akses layer publik belum menunjukkan perkembangan.	Nilai: 1%

layering informasi data BO yang dapat diakses public.	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif
Target B12: Adanya fitur kanal akses publik pada sistem basis data BO yang dilengkapi dengan identitas dan rencana pemanfaatan oleh pengguna.	Capaian Target: Jumlah akses layer publik pada B12 sudah mencapai 11,4%.	Nilai: 1%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif
Target B18: Adanya analisa dan rekapitulasi akses publik beserta informasi pemanfaatannya	Capaian Target: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai capaian output 2 sampai Triwulan V (B15) ini belum ada perubahan, yakni 1% • Belum ada capaian yang dapat dipenuhi karena target output baru ditetapkan/muncul di B12 • Kajian keterbukaan informasi publik data BO telah dilakukan oleh PWYP (Publish What You Pay) KemenkumHAM juga telah melakukan ekspos hasil kajian tersebut. Namun KemenkumHAM belum menindaklanjuti hasil kajian tersebut karena ketiadaan dasar hukum • KemenkumHAM perlu membuat kebijakan untuk menyediakan sistem keterbukaan informasi BO kepada publik sebagaimana masukan dari masyarakat sipil 	Nilai: 1%

	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 3: Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.		
Stranas PK		
Target B06: Adanya pemetaan dan penetapan layering informasi data BO yang akan digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka penanganan perkara.	Capaian Target: Jumlah layer akses APH untuk kebutuhan penegakan hukum belum ada progress.	Nilai: 1%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian	Aktif
Target B12: Adanya fitur kanal akses pada sistem basis data BO yang dapat oleh APH, termasuk APIP dalam rangka penanganan perkara	Capaian Target: Jumlah layer akses APH untuk kebutuhan penegakan hukum mencapai progress sebesar 17%	Nilai: 4%
	Proses Kokreasi: Melibatkan PWYP dalam diskusi pengembangan fitur kanal akses pada sistem basis data BO	Aktif
Target B18: 1. Adanya analisa	Capaian Target:	Nilai: 20,6%

<p>dan rekapitulasi akses APH</p> <p>2. Adanya analisa dan rekapitulasi perizinan yang informasi BO-nya telah terverifikasi</p> <p>3. Adanya fitur verifikasi BO berdasarkan tingkat risiko pada SIKAP</p>	<p>Nilai capaian output 3 sampai Triwulan V (B15) mengalami kemajuan cukup baik karena sumbangan dari beberapa K/L, khususnya Kementan dan KemenESDM pada indikator (b). Berikut progres dan kendala yang dapat disampaikan:</p> <p>a) KemenkumHAM belum dapat mengembangkan sistem tur untuk penyediaan akses Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Data BO dengan alasan belum ada kebijakan atau PKS mengenai dibukanya akses untuk APH terhadap data BO. Walaupun demikian akses atau pemanfaatan data telah dilakukan secara manual melalui surat permohonan dari LPH kepada KemenkumHAM. Yang terlapor sudah memanfaatkan data adalah KPK, PPATK, dan Kejaksaan.</p> <p>b) Proses perizinan di kementerian/lembaga pun belum sepenuhnya memanfaatkan data BO sebagai penapis. Hanya KemenESDM dan Kementan yang telah memanfaatkan data BO tersebut, dan telah didukung dengan ketentuan internalnya; BKPM sudah berkomitmen menerapkan data BO sebagai penapis perizinan di OSS.</p> <p>c) Pemanfaatan data BO oleh korporasi peserta pengadaan barang dan jasa juga sedang diupayakan baik oleh KemenkumHAM dan LKPP. Saat ini telah lahir draf PKS pada 15 Desember 2021. Draf PKS tersebut telah dikirimkan LKPP pada 22 Januari 2022, namun hingga saat ini belum ada feedback dari KemenkumHAM</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p>	<p>Aktif</p>

	Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	
PWYP		
Ukuran Keberhasilan 1: Adanya keterlibatan dan peran aktif Masyarakat Sipil dalam setiap tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, baik dalam pencapaian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya basis data BO. 2. Terbukanya akses data BO kepada Publik. 3. Termanfaatkannya data BO oleh Masyarakat Sipil, APH maupun K/L. 		
Target B06: 1. Adanya kajian keterbukaan data BO. 2. Adanya panduan memahami BO dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA.	Capaian Target: PWYP telah membantu menyusun Panduan Memahami BO serta Pemetaan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA. Kajian sudah diselesaikan seja B06.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: PWYP aktif berkoordinasi dengan Stranas – PK dan membantu mengawal keterbukaan data BO dengan menyusun kajian terkait keterbukaan data BO.	Aktif
Target B12: Adanya sosialisasi dan pelatihan untuk CSO dan/atau komunitas dalam memahami BO dan Memetakan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA.	Capaian Target: PWYP telah membuat webinar-webinar, serta bentuk sosialisasi lainnya (konten sosial media) terkait BO.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Namun pemerintah belum menemukan titik temu terkait data BO yang dapat diakses kepada publik.	Aktif

<p>Target B18:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aksi BO 2. Adanya <i>lesson learnt</i> pelaksanaan Aksi BO 	<p>Capaian Target:</p> <p>PWYP Indonesia telah memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan <i>Beneficial Ownership</i> (BO) di Indonesia, secara khusus pada portal akses informasi data BO oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua korporasi melaporkan data BO ke Ditjen AHU Kemenkumham (Hanya sekitar 26% korporasi yang telah melapor) - Data BO masih versi korporasi dan belum mendapatkan verifikasi dari pemerintah - Masih terdapat sejumlah perbedaan data BO antara Ditjen AHU dengan EITI (Kementerian ESDM). 	
<p>Tindak Lanjut:</p> <p>Berkoordinasi lebih intensif dengan Stranas PK dalam menemukan solusi atas keterbukaan data BO.</p>	<p>Proses Kokreasi</p> <p>PWYP telah terlibat dalam rapat-rapat terkait pelaksanaan <i>Beneficial Ownership</i> yang dilaksanakan oleh STRANAS-PK</p>	<p>Aktif</p>

Komitmen 18

Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.		
Kementerian PPN/Bappenas		
Target B06: Penelitian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restorative.	Capaian Target: Direktorat Hukum dan Regulasi telah melakukan penelitian yang hasilnya diharapkan dapat rekomendasi kebijakan penerapan keadilan restoratif dan menyatukan persepsi mengenai keadilan restoratif antar penegak hukum.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Direktorat Hukum dan Regulasi bersama konsorsium masyarakat sipil (ICJR, IJRS, dan LelP) melakukan berbagai rapat dan wawancara dengan K/L terkait dalam melaksanakan penelitian tersebut.	Aktif
Target B12: Tersedianya roadmap terkait Keadilan Restoratif.	Capaian Target: Telah tersedia peta jalan terkait keadilan restoratif yang menjabarkan 9 aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Definisi, Ruang Lingkup dan Mekanisme Pelaksanaan RJ. 2. Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP. 3. Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHAP. 	Nilai: 100%

	<p>4. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan dan pemenuhan hak bagi penyalahguna narkoba.</p> <p>5. Mekanisme Diversi Pada Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak (UU SPPA).</p> <p>6. Penguatan Substansi dan Kesiapan Implementasi Ketentuan RKUHP yang Mendukung Keadilan Restoratif.</p> <p>7. Penguatan Substansi dan Kesiapan Implementasi Ketentuan RKUHP yang Mendukung Keadilan Restoratif.</p> <p>8. Pemulihan Korban Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban (Pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat), UU Perlindungan Anak, dan UU TPPO.</p> <p>9. Penguatan Peran Penelitian Kemasyarakatan.</p>	
	<p>Proses Kokreasi:</p> <p>Bappenas telah melakukan kokreasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil OGI, dalam bentuk jejaring pendapat dan juga menerima masukan hasil kajian dari IJRS.</p>	Aktif
<p>Target B18: Diseminasi hasil kajian terkait ruang kewargaan oleh Sekretariat Open Government Indonesia</p>	<p>Target Capaian:</p> <p>Berdasarkan kesepakatan bersama antar Direktorat Hukum dan Regulasi dan OMS Keadilan, akan dilakukan perubahan target capaian, yakni pengubahan target menjadi “tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan” yang diundur ke periode B24. Oleh sebab itu, tidak ada pelaporan yang dilakukan untuk B18.</p>	Nilai: -

	Kesepakatan sudah ditandatangani antar kedua pihak.	
	Proses Kokreasi: Target diubah dan diundur ke B24 berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada pelaporan target capaian maupun hasil kokreasi dalam periode B18.	N/A
OMS Sektor Keadilan		
Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.		
Target B06: Tersedianya kajian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Capaian Target: Telah menyusun kajian bersama dengan Kementerian Bappenas.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi: Kajian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Aktif
Target B12: Tersedianya kajian dan rekomendasi mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta	Capaian Target: Walaupun OMS tidak mengumpulkan data dukung, kontribusi OMS tergambar dalam data dukung yang diberikan Bappenas.	Nilai: 100%
	Proses Kokreasi:	Aktif

hak berkumpul dan berorganisasi.	Walaupun OMS tidak mengumpulkan data dukung, keterlibatan OMS tergambar dalam data dukung yang diberikan Bappenas.	
Target B18: Tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan.	Capaian Target: Berdasarkan kesepakatan bersama antar Direktorat Hukum dan Regulasi dan OMS Keadilan, akan dilakukan perubahan target capaian, yakni pengunduran target “tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan” ke periode B24. Oleh sebab itu, tidak ada pelaporan yang dilakukan untuk B18. Kesepakatan sudah ditandatangani antar kedua pihak.	Nilai: -
	Proses Kokreasi: Target diubah dan diundur ke B24 berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada pelaporan target capaian maupun hasil kokreasi dalam periode B18.	N/A
Tindak Lanjut Menuju B24: Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas dan OMS Keadilan perlu melakukan kokreasi untuk tersedianya kajian perluasan untuk memberikan jaminan keterbukaan ruang kewargaan pada periode B24.		